

ENEWSLETTER

**PKS** PARLEMEN

Edisi Februari 2026

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# MENGECEM AGRESI

AS - ISRAEL

**PKS: KITA HARUS MENJAGA  
DUNIA DARI EKSPANSIONISME  
BARU**

Dr. **SUKAMTA**

Wakil Ketua Komisi i DPR RI





# KOMISI I

# Sohibul Iman Dorong Pendidikan Jadi Prioritas Utama dalam Peta Jalan AI Nasional



**Jakarta (07/02) — Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar rapat kerja membahas kebijakan serta strategi pengelolaan digital Komdigi. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Mohamad Sohibul Iman, menekankan pentingnya pendidikan sebagai prioritas.**

Hal tersebut disampaikannya sebagai respons atas poin-poin program percepatan atau quick win Peta Jalan Nasional AI yang diinisiasi oleh Kementerian Komdigi, di mana pendidikan termasuk di dalamnya.

“Untuk pendidikan, menurut saya pendidikan ini harus jadi quick win (program percepatan) yang paling diprioritaskan. Kenapa demikian? Karena pendidikan ini amanat konstitusi dan kemudian menjadi wajib belajar bagi seluruh warga negara,” ujarnya.

Ketua Majelis Syura PKS ini kemudian menyoroti kondisi kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam program percepatan penerapan Peta Jalan AI Nasional.

“Saya kira pendidikan kita hari ini perlu kita upayakan untuk semakin berkualitas. Jadi, menurut saya penerapan AI untuk pendidikan ini jauh lebih prioritas,” katanya.

Lebih spesifik, ia menjelaskan adanya perbedaan kualitas tenaga pendidik atau guru di berbagai daerah yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, menurutnya, penerapan AI dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga pendidik, khususnya di daerah, melalui pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran jarak jauh.

“Misalnya, bagaimana penerapan AI untuk distance learning atau pembelajaran jarak jauh, di mana kualitas guru-guru kita di daerah-daerah tentu berbeda. Ini saya kira menjadi cara penerapan AI untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas,” jelasnya.

Sohibul Iman juga menekankan bahwa quick win di bidang pendidikan sebaiknya tidak hanya terfokus pada Sekolah Rakyat, melainkan menyeluruh ke seluruh sekolah di Indonesia. Menurutnya, Sekolah Rakyat sejak awal memang dirancang sebagai sekolah bermutu tinggi, sementara tantangan utama justru berada pada pendidikan secara umum, terutama di daerah terpencil.

“Jadi, menurut saya jangan hanya fokus kepada Sekolah Rakyat saja, karena Sekolah Rakyat ini sejak awal dirancang untuk bermutu tinggi. Saya kira di situ memang dari awal guru-gurunya disiapkan yang terbaik. Jadi, sebetulnya tanpa penerapan AI sebagai quick win pun, mutu tenaga pendidiknya sudah relatif baik. Justru yang menjadi problem adalah pendidikan kita secara umum, terutama di daerah terpencil,” pungkas pria yang akrab disapa Kang Iman tersebut.

# Tanggapi Pernyataan tentang Wilayah Israel dari Nil hingga Eufrat, DPR: Kita Harus Jaga Dunia dari Ekspansionisme Baru

Jakarta (24/02) --- Pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang merujuk pada legitimasi Israel atas wilayah luas di Timur Tengah berdasarkan narasi historis dan teologis tertentu, memicu reaksi dari berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, pada Selasa (24/2), menanggapi pernyataan tersebut.

"Kami mencermati dengan serius pernyataan Huckabee ini. Dalam situasi geopolitik yang sensitif, pernyataan semacam ini berpotensi menimbulkan preseden normatif yang berbahaya. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Benjamin Netanyahu terdahulu tentang Greater Israel (Israel Raya), bahwa menurut narasi agama dan sejarah, wilayah Israel terbentang dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat yang meliputi Mesir, Palestina, Lebanon, Suriah, Turki, dan Yordania. Kita semua harus menjaga dunia dari ekspansionisme baru seperti ini."



"Kami mencermati dengan serius pernyataan Huckabee ini. Dalam situasi geopolitik yang sensitif, pernyataan semacam ini berpotensi menimbulkan preseden normatif yang berbahaya. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Benjamin Netanyahu terdahulu tentang Greater Israel (Israel Raya), bahwa menurut narasi agama dan sejarah, wilayah Israel terbentang dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat yang meliputi Mesir, Palestina, Lebanon, Suriah, Turki, dan Yordania. Kita semua harus menjaga dunia dari ekspansionisme baru seperti ini."

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa retorika ekspansionisme yang dibungkus legitimasi sejarah atau agama berisiko memicu ketegangan antarnegara, melemahkan diplomasi dan proses normalisasi kawasan, menguatkan kelompok ekstrem, dan mengikis kredibilitas sistem hukum internasional.

Sukamta juga menambahkan bahwa tatanan dunia modern dibangun di atas prinsip kedaulatan, integritas teritorial, kesetaraan negara, serta larangan perolehan wilayah melalui kekuatan sebagaimana ditegaskan PBB. Prinsip ini lahir dari pengalaman pahit perang besar dan menjadi fondasi stabilitas global selama beberapa dekade terakhir.

"Kita harus menjaga konsistensi terhadap prinsip ini, bukan hanya untuk konflik di Timur Tengah. Ini menyangkut masa depan tata dunia yang setara dan berbasis hukum. Jika integritas teritorial mulai direlatifkan, maka tidak ada kawasan yang benar-benar aman," katanya. Karena itu, ia mendukung pemerintah Indonesia yang tegas terhadap pernyataan Huckabee tersebut.

"Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia harus konsisten menegaskan bahwa setiap penyelesaian konflik harus berlandaskan hukum internasional dan penghormatan terhadap integritas teritorial. Dunia tidak boleh kembali pada pola klaim sepihak yang berpotensi menyeret kawasan-kawasan lain ke dalam ketidakstabilan," ujar wakil rakyat dari Yogyakarta ini.



# KOMISI II

# Aher Nilai Penurunan Indeks Harga di Aceh dan Sumatera Bukti Efektivitas Intervensi Distribusi Pascabencana



**Jakarta (08/02) --- Indeks Perkembangan Harga di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menunjukkan penurunan signifikan pada minggu ketiga Januari 2026 setelah sempat mengalami inflasi tinggi akibat gangguan distribusi pascabencana.** Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (27/01/2026) mengapresiasi kerja keras Perum Bulog dan pemerintah daerah yang melakukan pengiriman logistik minyak goreng dan beras secara masif, bahkan menggunakan helikopter Hercules untuk menjangkau area terisolasi. Infrastruktur jalan nasional di tiga provinsi tersebut kini telah berfungsi kembali sepenuhnya, dan mayoritas pasar tradisional telah kembali beroperasi melayani masyarakat. Penurunan harga ini merupakan hasil nyata dari intervensi percepatan jalur distribusi serta pembukaan akses jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI, yang diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi warga di wilayah terdampak secara berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menilai Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menunjukkan penurunan signifikan pada minggu ketiga Januari 2026, setelah sebelumnya mengalami tekanan inflasi tinggi akibat terganggunya jalur distribusi karena bencana alam. Penurunan harga tersebut menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi wilayah terdampak, sekaligus mencerminkan efektivitas langkah cepat pemerintah dalam mengatasi gangguan distribusi kebutuhan pokok.

**“Penurunan Indeks Perkembangan Harga ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah berjalan efektif. Distribusi kembali lancar dan pasokan kebutuhan pokok mulai stabil,” ujar Kang Aher saat diwawancarai awak media di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta.**

SELANJUTNYA ►

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri atas perhatian serius terhadap stabilisasi harga, serta kerja keras Perum Bulog dan pemerintah daerah. Pengiriman logistik minyak goreng dan beras dilakukan secara masif, termasuk dengan memanfaatkan helikopter Hercules untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sempat terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur dinilai sebagai faktor kunci pemulihan. Saat ini, infrastruktur jalan nasional di ketiga provinsi tersebut telah berfungsi kembali sepenuhnya, sehingga arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat dapat berjalan normal. Selain itu, mayoritas pasar tradisional telah kembali beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Pemulihan akses jalan dan distribusi logistik menjadi kunci utama. Ketika jalur distribusi dibuka, harga otomatis terkoreksi dan daya beli masyarakat bisa dijaga,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat II ini menegaskan bahwa penurunan harga tersebut merupakan hasil nyata dari percepatan jalur distribusi serta pembukaan akses jalan yang dilakukan secara sinergis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI. Sinergi lintas sektor tersebut dinilai krusial dalam merespons kondisi darurat serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

“Kita berharap upaya pengendalian harga dan penguatan distribusi dapat terus dijaga secara berkelanjutan, sehingga stabilitas ekonomi warga tetap terpelihara dan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal,” demikian tutup Kang Aher.



# Aus Hidayat Nur Soroti Tantangan Pers dan AI dalam Demokrasi

**Jakarta (13/02) --- Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur, menyoroti potensi konflik antara dunia pers dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem demokrasi, politik, dan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan melalui rilis media pada Kamis, 12 Februari 2026.**

Dalam forum tersebut, Aus menekankan pentingnya membedakan antara capaian investasi yang benar-benar telah terealisasi dengan investasi yang masih sebatas rencana atau komitmen di atas kertas.

Dalam keterangannya, Aus menyatakan bahwa kemajuan teknologi AI membawa dampak signifikan terhadap ekosistem informasi nasional, khususnya dalam produksi, distribusi, dan interpretasi informasi politik. Ia menilai perkembangan ini perlu disikapi secara serius karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi.

“Pers selama ini berfungsi sebagai pilar demokrasi dan pengawas kekuasaan. Namun kini, AI hadir sebagai aktor baru yang mampu memproduksi dan menyebarkan informasi dalam skala besar dan sangat cepat,” ujar Aus dalam rilis tersebut. Menurut Aus, salah satu kerawanan terbesar adalah meningkatnya potensi disinformasi, termasuk penggunaan teknologi deepfake untuk memanipulasi pernyataan atau citra tokoh publik. Ia menilai kondisi ini sangat berbahaya, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu atau dalam situasi krisis nasional.

“Jika tidak diantisipasi, AI bisa dimanfaatkan untuk membentuk opini publik secara manipulatif. Ini berpotensi merusak legitimasi demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara maupun media,” jelasnya.

Aus juga menyoroti adanya pergeseran otoritas informasi di tengah masyarakat. Ia mengamati bahwa publik kini cenderung mencari ringkasan atau jawaban instan melalui sistem AI dibandingkan membaca laporan jurnalistik secara utuh. “Pers bekerja dengan standar verifikasi dan tanggung jawab etis. Sementara AI bekerja berdasarkan algoritma dan data. Jika publik lebih mempercayai sistem yang tidak memiliki akuntabilitas moral, ini menjadi tantangan serius bagi demokrasi,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Aus menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan AI oleh institusi pemerintah. Ia mengingatkan agar penerapan teknologi dalam analisis kebijakan dan pelayanan publik tidak menjadi ‘kotak hitam’ yang sulit diawasi.

“Algoritma tidak boleh menggantikan akuntabilitas. Setiap kebijakan publik harus tetap bisa diuji dan diaudit secara terbuka,” ujarnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Aus mendorong adanya regulasi yang adaptif serta penguatan etika penggunaan AI. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pers, pemerintah, dan pengembang teknologi agar AI tidak menjadi alat manipulasi kekuasaan.

“AI bukan musuh demokrasi, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai konstitusional. Pers tetap memegang peran penting sebagai penjaga kebenaran dan pengawas kekuasaan,” tutupnya.





# KOMISI III

# Perkuat Integritas Sistem Keuangan Nasional, Adang Daradjatun Dorong Kejelasan Tindak Lanjut Intelijen Keuangan PPATK

**Jakarta (04/02) --- Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya kejelasan tindak lanjut atas hasil analisis dan temuan intelijen keuangan yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada aparat penegak hukum.**

Adang menyampaikan dukungannya terhadap peran strategis PPATK sebagai pusat intelijen keuangan negara dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Menurutnya, penguatan peran tersebut harus diiringi dengan kejelasan progres dan outcome dari setiap rekomendasi yang disampaikan.

Ia menegaskan bahwa hasil analisis intelijen keuangan PPATK tidak boleh berhenti pada penyampaian laporan, melainkan harus dapat ditelusuri secara jelas hingga tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemulihan aset, dan pengembalian kerugian negara.

Adang juga menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI mendukung penguatan pemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK di seluruh program pemerintah, serta mendorong peningkatan kerja sama dan sinergisitas lintas sektor dalam rangka memperkuat penegakan hukum dan mempercepat pemulihan kerugian negara.

Adang juga menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI mendukung penguatan pemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK di seluruh program pemerintah, serta mendorong peningkatan kerja sama dan sinergisitas lintas sektor dalam rangka memperkuat penegakan hukum dan mempercepat pemulihan kerugian negara.

Selain itu, Komisi III DPR RI mendorong PPATK untuk terus meningkatkan kualitas produk intelijen keuangan melalui penguatan pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan green financial crime (GFC), kebocoran penerimaan negara, serta aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan masyarakat.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi tindak pidana, khususnya di sektor sumber daya alam dan penerimaan negara, termasuk progres penanganannya oleh aparat penegak hukum.



**“Intelijen keuangan harus berdampak nyata bagi penegakan hukum dan keadilan, bukan sekadar berhenti pada laporan,” tegas Adang.**

# Aboe Bakar Desak Aparat Buru Aktor Intelektual di Balik Penyelundupan 2 Ton Narkoba

**Jakarta (22/02) — Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, meminta aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada penangkapan anak buah kapal (ABK) dalam kasus penyelundupan 2 ton narkoba menggunakan Kapal Sea Dragon. Ia menegaskan, aparat harus memburu aktor intelektual (intellectual dader) yang berada di balik jaringan besar tersebut.**

Menurut Aboe Bakar, penangkapan ABK asal Medan, Sumatera Utara, Fandi Ramadhan, tidak serta-merta menyelesaikan perkara.

“Secara logika, Fandi Ramadhan yang hanya seorang ABK tentu bukan pemilik Kapal Sea Dragon. Tidak mungkin pula dia memiliki kemampuan finansial untuk membeli atau mengendalikan 2 ton narkoba. Dengan menangkap dan memidanakan Fandi, bukan berarti perkara ini selesai,” ujar Aboe Bakar dalam keterangannya, Minggu (22/2).

Ia menegaskan bahwa dalam proses pidana, menghukum ABK memang bisa saja dilakukan apabila terbukti bersalah. Namun, ia mengingatkan agar aparat tidak menjadikan mereka sebagai tumbal demi menutup perkara besar yang seharusnya diusut tuntas.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pelaku lapangan. Menghukum ABK bisa saja dilakukan sesuai fakta persidangan, tetapi jangan sampai mereka menjadi tumbal. Aparat harus mampu mengungkap dan menangkap aktor intelektual dari perkara ini,” tegasnya.



Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, penyelundupan narkoba dalam jumlah sangat besar seperti 2 ton jelas melibatkan jaringan terorganisasi, mulai dari pemodal, pengendali distribusi, hingga operator lapangan.

“Seluruh jaringan, mulai dari pemodal, pengatur logistik, hingga operator, harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini bukan kejahatan kecil, ini kejahatan terstruktur dan masif yang merusak generasi bangsa,” katanya.

[SELANJUTNYA ►](#)

Aboe Bakar menambahkan, pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan hanya dengan menangkap dan menghukum pion-pion lapangan. Penegakan hukum, menurutnya, harus menyentuh akar persoalan.

“Kalau kita hanya menangkap kurir dan ABK, jaringan akan terus tumbuh. Pemberantasan narkoba harus sampai ke akarnya, yakni aktor intelektual dan pemodal besar di baliknya. Tanpa itu, perang terhadap narkoba tidak akan pernah benar-benar dimenangkan,” ujarnya.

Ia pun mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengusut kasus ini agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan narkoba tetap terjaga.

“Komisi III DPR RI tentu akan memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus ini. Kita ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan menyeluruh, bukan terbang pilih,” pungkasnya.





# KOMISI IV

# Ketua Fraksi PKS DPR RI Dorong Penguatan Peran Pemuda dalam Pembangunan Demokrasi



**Jakarta (11/02) --- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai penguatan peran generasi muda menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi sekaligus keberlanjutan kepemimpinan bangsa.**

Pandangan tersebut disampaikan Abdul Kharis saat menerima kunjungan silaturahmi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rombongan PP KAMMI dipimpin Ketua Umum Ahmad Jundi Khalifatullah, didampingi Sekretaris Jenderal dan sejumlah pengurus harian.

Dalam pertemuan itu, Abdul Kharis mengapresiasi aspirasi yang disampaikan PP KAMMI terkait pentingnya pengarusutamaan peran pemuda dalam ruang-ruang kebijakan publik dan demokrasi.

Menurut Abdul Kharis, generasi muda memiliki posisi strategis dalam memastikan keberlanjutan demokrasi. Karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk mendorong partisipasi pemuda sekaligus memperkuat kapasitas kepemimpinan mereka. "Penguatan peran pemuda perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan dan pemberian ruang partisipasi yang memadai," kata Abdul Kharis.

Ia menambahkan, Fraksi PKS memandang keterlibatan pemuda sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Partisipasi tersebut, menurutnya, perlu diarahkan agar bersifat substantif, tidak sekadar simbolik.

**"Fraksi PKS berkomitmen mendorong proses regenerasi yang terencana dan inklusif, dengan membuka kesempatan yang setara bagi generasi muda untuk berkontribusi," ujarnya.**

Abdul Kharis menegaskan, Fraksi PKS menempatkan penguatan peran pemuda sebagai bagian dari agenda strategisnya di parlemen. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya berkelanjutan untuk menghadirkan ruang dialog dan partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda.

# Riyono Tegaskan Komisi IV DPR RI Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan, Pastikan Tetap Terjangkau



Jakarta (19/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menegaskan komitmen Komisi IV DPR RI dalam mengawasi stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Riyono menyampaikan bahwa Komisi IV memberikan perhatian serius terhadap keterjangkauan harga pangan, terutama sembilan bahan pokok nasional, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa dibebani lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Komisi IV concern untuk menjaga agar pangan terjangkau oleh masyarakat dengan harga yang baik. Sehingga kita melaksanakan pengawasan terhadap pangan, sembilan kebutuhan pangan pokok nasional agar masyarakat di bulan Ramadan ini bisa menghasilkan ibadah yang baik,” ujar Riyono.

Ia menekankan bahwa tidak hanya aspek keterjangkauan harga, Komisi IV juga memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan bahan pangan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. “Harga pangan yang terjangkau, harga pangan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, dan tentu pangan yang aman, berkualitas,” lanjutnya.

Riyono menjelaskan bahwa Komisi IV secara aktif mengawasi berbagai komoditas strategis, mulai dari beras, minyak goreng, gula, hingga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih, agar tetap berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Mulai dari minyak, daging, beras, kemudian bawang merah, bawang putih, gula, semuanya kita jaga agar harganya sesuai dengan eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan apabila ditemukan harga pangan yang melampaui ketentuan yang berlaku. “Kalau ada yang menaikkan HET, sampaikan kepada Komisi IV, sampaikan kepada saya,” pungkas Riyono.

Melalui pengawasan yang intensif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Komisi IV DPR RI berharap stabilitas harga pangan dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.



# Johan Rosihan: Negara Harus Jaga Stabilitas Harga Pangan agar Ramadan Tenang



Jakarta (19/02) --- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan menjelang dan selama bulan Ramadan. Hal tersebut disampaikan Johan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (19/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Johan, Ramadan bukan hanya momentum spiritual untuk meningkatkan iman dan ibadah, tetapi juga momentum tanggung jawab kebangsaan untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, khususnya dalam hal pangan.

“Ramadan itu mengajarkan kita tentang puasa, memahami arti lapar. Karena itu negara harus hadir untuk menjaga stabilitas pangan dan kepedulian terhadap rakyat kecil. Kita tentu ingin Ramadan itu tenang tanpa gejolak harga sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk,” ujar Johan.

Ia menegaskan, Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan langsung di lapangan, khususnya di pasar-pasar tradisional, untuk memastikan klaim pemerintah terkait ketersediaan stok dan stabilitas harga benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami insya Allah pasca reses ini akan turun ke pasar-pasar untuk melihat komitmen pemerintah. Pemerintah sudah menyatakan dan mengklaim kepada kami bahwa stok itu aman, harga itu terkendali. Nah, sekarang kita ingin tahu apakah benar di tingkat lapangan itu,” lanjutnya.

Johan mengakui bahwa secara umum ketersediaan stok pangan diyakini cukup. Namun, ia menyoroti persoalan distribusi dan keterjangkauan harga sebagai tantangan utama yang perlu segera diatasi pemerintah.

“Kalau stok kami percaya itu yakin ada, tapi persoalannya adalah keadilan distribusi dan tentu tentang keterjangkauan harga. Hari ini kami sudah mendapat keluhan bahwa harga-harga pokok, terutama cabai dan bawang, itu sudah mulai meningkat,” ungkapnya.

Ia pun meminta pemerintah untuk mengambil langkah konkret dan cepat guna melindungi masyarakat dari lonjakan harga pangan, terutama agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan tanpa beban ekonomi tambahan.

“Karena itu pemerintah harus hadir, melindungi rakyat, melindungi agar kita khusyuk beribadah. Marhaban ya Ramadan,” tutup Johan.

Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, pangan, kelautan, dan kehutanan, terus berkomitmen untuk memastikan stabilitas pangan nasional, khususnya pada momen penting seperti Ramadan, ketika permintaan bahan pokok meningkat secara signifikan.



## Komisi IV DPR RI: Diplomasi Ekonomi Wajib Selaras dengan Kedaulatan dan Perlindungan Petani

Jakarta (22/02) — Anggota Komisi IV DPR RI F-PKS, Slamet, merespons kebijakan pemerintah terkait pembebasan kuota dan tarif masuk bagi sejumlah produk pangan dan pertanian asal Amerika Serikat sebagaimana disampaikan oleh Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan.

Menurut Slamet, kerja sama perdagangan Indonesia–Amerika Serikat merupakan langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia. “Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga bahan baku industri serta memperkuat hubungan dagang kedua negara,” ujarnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan pembebasan kuota dan tarif 0 persen tidak boleh mengabaikan kepentingan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan nasional.

“Komisi IV DPR RI berkepentingan memastikan bahwa setiap kebijakan perdagangan tidak melemahkan ketahanan dan kedaulatan pangan kita. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk efisiensi justru berdampak pada menurunnya daya saing petani dan produsen dalam negeri,” tegasnya.

Slamet menyoroti pentingnya pemetaan komoditas secara selektif. Produk yang memang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, seperti bahan baku tertentu untuk industri, dapat diberikan kelonggaran dengan pengawasan ketat. Namun, untuk komoditas yang bersinggungan langsung dengan produksi petani lokal, pemerintah diminta berhati-hati agar tidak terjadi tekanan harga yang merugikan.

Ia juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan instrumen pengamanan pasar domestik (safeguard) apabila terjadi lonjakan impor dan mempercepat program peningkatan produksi serta produktivitas dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor tidak semakin dalam.

“Perdagangan internasional penting, tetapi kedaulatan pangan lebih penting. Kita mendukung diplomasi ekonomi yang kuat, namun pada saat yang sama pemerintah wajib memastikan perlindungan yang memadai bagi sektor pertanian nasional,” tambahnya.

Sebagai mitra kerja pemerintah di sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan pangan, Komisi IV DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil.



# KOMISI V

# Abdul Hadi Minta Pemerintah Pastikan Transportasi Aman dan Perluas Subsidi Tiket Jelang Mudik Lebaran

Jakarta (19/02) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Hadi, meminta pemerintah memastikan kesiapan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau menjelang arus mudik Lebaran. Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (19/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan.



Abdul Hadi menegaskan bahwa mudik merupakan momen besar yang melibatkan pergerakan jutaan masyarakat, sehingga memerlukan persiapan matang dari pemerintah, khususnya terkait kelayakan transportasi dan dukungan fasilitas bagi pemudik.

“Kalau ke depan kita akan mudik ke Lebaran, maka pemerintah harus siapkan transportasi yang aman dan nyaman. Karena mudik Lebaran ini akan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah,” ujar Abdul Hadi.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, sekitar 140 juta orang melakukan perjalanan mudik menggunakan berbagai moda transportasi. Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan seluruh armada transportasi, baik darat, laut, maupun udara, dalam kondisi layak operasi.

Abdul Hadi juga menyoroti masih ditemukannya kendaraan yang tidak layak namun tetap beroperasi, yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

“Kami meminta pemerintah memastikan alat transportasi kita tidak bermasalah, baik udara, darat, maupun laut. Karena sebelumnya masih ditemukan bus dan kapal laut yang tidak layak jalan, bahkan mengalami gangguan di tengah perjalanan yang membuat masyarakat panik,” tegasnya.

Selain aspek keselamatan, Abdul Hadi juga mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat melalui subsidi tiket transportasi, serta memperluas program mudik gratis.

“Kami meminta pemerintah menyiapkan subsidi tiket bagi masyarakat, baik tiket pesawat, kereta api, maupun bus. Bahkan kalau bisa, program mudik gratis diperbanyak karena hal ini sangat ditunggu oleh masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pendukung seperti rest area, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya, agar masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman dan nyaman, khususnya di tengah suasana Ramadan.

Abdul Hadi berharap dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antar instansi, penyelenggaraan mudik tahun ini dapat berjalan lancar serta memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

# Saadiah Uluputty: Polemik PMK 81/2025 dan Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Cacat Hukum dan Bebani Desa



Jakarta (05/02) --- Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) serta Menteri Transmigrasi. DPR RI menyoroti implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang mewajibkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai syarat pencairan Dana Desa Tahap II.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty mencecar pemerintah terkait penerapan asas non-retroaktif, yakni hukum tidak boleh berlaku surut, dalam PMK 81/2025. Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan waktu yang fatal. PMK 81/2025 baru diundangkan pada akhir November 2025, namun desa dipaksa memenuhi syarat pencairan dengan tenggat waktu 17 September 2025.

“Bagaimana mungkin kepala desa diminta memenuhi syarat administrasi seperti akta dan komitmen APBDes pada tanggal yang sudah lewat sebelum aturannya ada? Ini jelas maladministrasi dan menciptakan ketidakpastian hukum yang luar biasa,” tegas Saadiah. Syarat wajib pembentukan koperasi ini dinilai mengancam pencairan Dana Desa Tahap II, khususnya kategori Non-IRM untuk pembangunan infrastruktur. Jika syarat tersebut gagal dipenuhi, dampak sistemik pun membayangi. Pembangunan fisik desa terancam terhenti total, dan desa berpotensi terjebak utang kepada pihak ketiga.

Sejumlah kepala desa menyatakan keberatan bukan karena menolak visi Presiden, melainkan akibat minimnya sosialisasi dan pemahaman terhadap struktur kebijakan. “Desa-desa di pegunungan dan daerah terpencil bingung. Ruh koperasi adalah perputaran ekonomi, tetapi jika gerai tidak bisa dibuka karena akses yang sulit, bagaimana bisnis bisa berjalan? Jangan sampai koperasi hanya menjadi beban administratif,” ungkap perwakilan desa saat menyampaikan aspirasi kepada Saadiah dalam kunjungan ke daerah pemilihan.

Menanggapi polemik tersebut, Saadiah Uluputty menyampaikan catatan Fraksi PKS yang memuat sejumlah poin krusial, antara lain: Pertama, Tinjau Ulang Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 dan meminta agar aturan prioritas penggunaan Dana Desa dikaji kembali, khususnya terkait alokasi operasional pemerintah desa maksimal 3 persen agar tidak tergerus hanya untuk urusan koperasi. Kedua, Hapus Syarat Penyaluran Tahap II yang mendasak agar syarat pembentukan koperasi tidak dijadikan harga mati untuk pencairan dana pembangunan fisik yang telah berjalan.

Adapun ketiga, Sistem Pilot Project dengan engusulkan agar Koperasi Desa Merah Putih diuji coba terlebih dahulu di provinsi terpilih dengan evaluasi independen sebelum diterapkan secara nasional. Keempat, meminta adanya masa transisi agar urusan operasional desa di luar koperasi tetap dapat diselesaikan. Serta terakhir, mengusulkan agar cicilan utang koperasi kepada bank Himbara tidak memotong Dana Desa, melainkan bersumber dari murni keuntungan bisnis koperasi tersebut.

Saadiah juga menegaskan, sebagai wakil rakyat, ia mengingatkan pemerintah bahwa semangat membangun ekonomi desa melalui koperasi tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar perangkat desa maupun pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.



# KOMISI VI

# Nevi Zuairina: Rencana Impor Mobil Operasional Koperasi Merah Putih Harus Lindungi Industri Nasional

Jakarta (24/02) --- Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa rencana pemerintah melalui PT Agrinas untuk mengimpor mobil operasional bagi Koperasi Merah Putih perlu ditelaah secara cermat dan hati-hati.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi industri otomotif nasional yang saat ini memiliki kapasitas produksi signifikan, baik untuk kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan.

Nevi menyampaikan bahwa sepanjang kebutuhan dan spesifikasi teknis kendaraan yang dimaksud tersedia di dalam negeri, maka industri nasional harus menjadi pilihan utama. Politisi PKS ini menilai berbagai pabrikan otomotif yang beroperasi di Indonesia telah memiliki fasilitas manufaktur dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan produksi nasional semakin kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.



“Prinsip dasarnya adalah kebutuhan nasional harus diutamakan dipenuhi oleh industri dalam negeri sepanjang kapasitas dan spesifikasinya tersedia,” ujar Nevi.

Legislator Sumbar II ini menambahkan bahwa sebelum kebijakan impor diputuskan, pemerintah perlu memastikan secara objektif apakah jenis kendaraan yang dibutuhkan benar-benar belum tersedia di dalam negeri, apakah volume produksi nasional tidak mencukupi, serta apakah harga dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan koperasi memang tidak dapat dipenuhi oleh produsen lokal.

Ketua Poksi VI FPKS tersebut juga mengingatkan bahwa kebijakan impor kendaraan memiliki implikasi luas terhadap industri otomotif nasional, tenaga kerja, serta rantai pasok dalam negeri. Menurutnya, dengan mengutamakan produk dalam negeri, pemerintah tidak hanya mendukung industri manufaktur, tetapi juga memperkuat multiplier effect terhadap UMKM, industri komponen, dan penciptaan lapangan kerja.

Nevi menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak pada koperasi harus berjalan seiring dengan perlindungan dan penguatan industri nasional. Sinergi antara koperasi dan industri dalam negeri justru akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berdaulat.

Ia pun menegaskan bahwa setiap rencana impor wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menegaskan bahwa kegiatan impor harus melindungi kepentingan nasional. “Rencana ini harus dikaji secara komprehensif agar sejalan dengan prinsip perlindungan industri nasional,” pungkas Nevi Zuairina.



# **KOMISI VII**

# Alifudin Dorong Penambahan Penerbangan ke Pontianak Jelang Cap Go Meh

**Jakarta (19/02) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mendorong penambahan jumlah penerbangan menuju Pontianak, Kalimantan Barat, guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama momentum perayaan Imlek dan Cap Go Meh. Hal tersebut disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.**

Alifudin menjelaskan bahwa perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, merupakan agenda budaya dan pariwisata penting yang menarik banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan transportasi udara dan akomodasi.

“Kemarin adalah Imlek dan nantinya akan Cap Go Meh yang biasanya karena di sana ada momentum pariwisata, termasuk pariwisata nasional dan internasional, dihadiri oleh wisatawan dan masyarakat,” ujar Alifudin.

Ia menambahkan, lonjakan mobilitas masyarakat pada momentum tersebut harus diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan kendala, baik bagi masyarakat yang merayakan maupun yang memiliki kepentingan perjalanan lainnya.

“Kegiatan Cap Go Meh biasanya membuat pesawat sangat ramai dan penginapan juga penuh. Kita harapkan ini bisa diantisipasi agar masyarakat yang merayakan maupun yang tidak merayakan tetap bisa bepergian dengan lancar,” lanjutnya.



[SELANJUTNYA ►](#)

Alifudin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan langsung kepada pengelola bandara, termasuk Angkasa Pura, agar memastikan ketersediaan armada dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

“Kami minta agar ada tambahan-tambahan pesawat ke Pontianak terkait momentum Imlek dan Cap Go Meh, sehingga kebutuhan transportasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” tegasnya.

Menurut Alifudin, penambahan frekuensi penerbangan tidak hanya penting untuk kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung sektor pariwisata daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Ia berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan transportasi di daerah, khususnya pada momentum perayaan besar yang berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.



# Hendry Munief Sambut Positif Diskon Tiket Pesawat Domestik Jelang Lebaran



**Jakarta (16/02) — Kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan. Salah satunya dari anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief.**

Hal itu disampaikan oleh Hendry Munief saat dihubungi pada Senin (16/2/2026). Ia meyakini kebijakan ini akan meringankan beban masyarakat yang merencanakan perjalanan selama masa liburan Lebaran nantinya.

“Kebijakan ini jadi angin segar bagi masyarakat. Di mana, saat ekonomi saat ini masih berat, diringankan oleh kebijakan ini. Tentu masyarakat akan merencanakan perjalanan negerinya, baik itu pulang kampung atau sekadar libur Lebaran. Semua pihak menikmatinya,” terang Hendry Munief.

Untuk memanfaatkan kebijakan ini, ia menyarankan agar mitra Komisi VII DPR memaksimalkan kebijakan atau program turunan sebagai pendukung kebijakan tersebut.

“Seperti di Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat memberikan promosi destinasi yang menarik di setiap daerah. Mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan kebijakan ini guna meraup keuntungan maksimal. Atau di Kementerian UMKM, mereka bisa mendorong pelaku UMKM seperti toko oleh-oleh memberikan insentif serupa sehingga wisatawan makin tertarik melakukan perjalanan wisata ke daerah mereka,” kata Hendry Munief.

Perlu diketahui, pemerintah beberapa waktu lalu mengumumkan pemberian diskon tiket pesawat sebesar 17 hingga 18 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Diskon ini berlaku pada periode 14–29 Maret 2026.

Kebijakan ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau 3,32 juta penumpang. Ini merupakan sinergi lintas kementerian dan lembaga bersama para pemangku kepentingan industri penerbangan.

# Alqassam Kasuba Desak Pemerintah Klarifikasi Profil Pemenang Lelang Telaga Ranu



**Jakarta (19/02) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Alqassam Kasuba, mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan klarifikasi transparan terkait penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara.**

Langkah ini diambil guna merespons dinamika publik mengenai latar belakang korporasi PT Ormat Geothermal Indonesia yang diduga memiliki keterkaitan dengan entitas negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.

Dalam keterangan resminya, legislator asal daerah pemilihan Maluku Utara tersebut menekankan bahwa setiap kebijakan investasi di sektor strategis harus senada dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. Alqassam mengingatkan agar aspek teknis ekonomi tidak menabrak koridor Pembukaan UUD 1945.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka profil serta rekam jejak pemenang lelang di Telaga Ranu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedaulatan energi nasional tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan konsistensi sikap Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa, termasuk Palestina,” ujar Alqassam Kasuba di Jakarta, Kamis (19/2).

Lebih lanjut, Alqassam menyoroti bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya masyarakat di Maluku Utara. Menurutnya, proyek energi terbarukan harus memiliki social license atau mandat sosial agar operasional di lapangan tidak menuai resistensi.

“Masyarakat Maluku Utara menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan etika universal. Pemerintah perlu melakukan uji tuntas (due diligence) yang menyeluruh. Jangan sampai kehadiran investasi di daerah justru memicu kegaduhan sosiologis akibat minimnya transparansi mengenai afiliasi korporasi yang bersangkutan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Alqassam menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga diperoleh penjelasan yang kredibel dari otoritas terkait. Ia berharap transisi energi menuju masa depan hijau di Halmahera berjalan tanpa meninggalkan beban polemik geopolitik.

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi geothermal di daerah. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh mencederai integritas diplomasi nasional. Klarifikasi resmi dari Kementerian ESDM sangat dinantikan agar arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar dan bermartabat,” pungkask Alqassam.



# KOMISI **VIII**

# HNW: Perjanjian Dagang RI-AS tentang Kehalalan Harus Sejalan UU Jaminan Produk Halal

**Jakarta (25/02) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid dalam masa reses DPR kali ini banyak menerima masukan dan kritik dari konstituennya terkait Perjanjian Dagang Timbal Balik antara Indonesia dengan Amerika Serikat, termasuk soal ketentuan keharusan pencantuman sertifikat halal bagi produk halal maupun keterangan nonhalal bagi produk nonhalal.** Mengingat Indonesia adalah negara berdaulat dan negara hukum, di mana di antara hukum yang ada dan berlaku di Indonesia adalah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang dikuatkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang berisi keharusan pencantuman label halal bagi produk halal (Pasal 25) dan pencantuman keterangan nonhalal bagi produk nonhalal (Pasal 26).

Masalahnya, publik memahami bahwa akta Perjanjian Dagang yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia dan AS (19/2/2026) itu justru mengaburkan soal ketentuan label halal tersebut untuk tidak diberlakukan bagi barang-barang impor dari AS. Maka Pemerintah Indonesia diingatkan untuk terbuka terhadap masukan konstruktif dari masyarakat, bahkan dari MUI, dengan mengkaji ulang dan mengkritisi kembali ketentuan terkait labelisasi halal produk pada perjanjian dagang (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan Amerika agar sesuai dengan ketentuan hukum yang masih berlaku di Indonesia yang secara resiprokal mestinya juga dihormati oleh AS sebagai mitra dagang Indonesia.



HNW, sapaan akrabnya, juga mendapatkan bahwa argumen Mutual Recognition Agreement (MRA) pada sertifikasi halal yang disampaikan oleh pihak pemerintah dengan maksud mengklarifikasi, malah kontradiktif dengan berbagai isi perjanjian dagang itu yang cenderung tidak sesuai dengan ketentuan terkait sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang diatur dalam UU yang masih berlaku di Indonesia.

“Sesuai penjelasan Kepala BPJPH, Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memang sudah menjalin MRA sertifikasi halal dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Namun ketika isi perjanjian dagang timbal balik Indonesia–Amerika Serikat itu menyebutkan pembebasan (exemption) sertifikat halal pada berbagai jenis produk, maka jelas itu bukan MRA, tetapi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan UU JPH yang masih berlaku di Indonesia. Maka pemerintah Indonesia, sesuai dengan prinsip resiprokal yang menjadi spirit dari perjanjian dagang itu, seharusnya membuka kembali pembahasan kesepakatan terkait isu labelisasi halal ini dengan pihak berkewenangan di AS agar perjanjian dagang ini tidak hanya menguntungkan AS, tetapi malah sangat merugikan Indonesia sebagai negara hukum dan berdaulat dengan konsumen yang mayoritas mutlakannya beragama Islam,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menjelaskan, MRA yang dijalin BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) pada dasarnya terkait pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal di antara kedua negara.

SELANJUTNYA ►

Artinya, produk yang beredar di Indonesia dari negara yang sudah memiliki MRA tetap wajib bersertifikat halal, meskipun sertifikatnya dikeluarkan oleh LHLN dan bukan oleh BPJPH.

Sayangnya, poin-poin perjanjian pada ART itu terkesan hendak menghapus kewajiban sertifikasi label halal dan pencantuman keterangan nonhalal bagi produk yang tidak halal. Di bagian Komitmen Spesifik (Annex III) Hambatan Non-Tarif (Section 2), Indonesia malah disebut diharuskan membebaskan produk Amerika dari sertifikasi halal dan kewajiban pencantuman label halal pada produk nonhewani (Article 2.22), produk kosmetik, kesehatan, dan barang manufaktur lainnya (Article 2.9).

Menurut HNW, munculnya poin-poin tersebut menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum di masyarakat serta kerancuan apakah intensinya menguatkan keabsahan sertifikat halal dari Amerika Serikat yang faktanya sudah berjalan melalui MRA tanpa perlu diintervensi dengan ketentuan baru dalam akta perjanjian dagang, atau justru menghilangkan kewajiban sertifikasi halal serta meniadakan kewajiban pencantuman keterangan nonhalal atas barang yang diproduksi di Amerika dan akan diperdagangkan di Indonesia.



“Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang masih berlaku di Indonesia tegas menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dan produk yang tidak halal pun wajib mencantumkan keterangan ‘nonhalal’ (Pasal 26 ayat 2). Ini seharusnya menjadi acuan yang diperjuangkan pemerintah dalam pembahasan dan sebelum penandatanganan kesepakatan dagang yang disebut resiprokal itu, karena memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia warga Indonesia, termasuk sebagai konsumen, adalah kewajiban Negara Indonesia (UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat 4). Selain sebagai bentuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara sebagai negara hukum (UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3) di bidang yang terkait dengan kehalalan dan ketidakhalalan produk,” tegasnya.

Hidayat menilai, selain soal terpenuhinya HAM terkait beragama dan melaksanakan ajaran agama yang dijamin UUD NRI 1945, termasuk dalam mengonsumsi atau mendapat penjelasan soal kehalalan atau ketidakhalalan produk bagi warga Indonesia yang mayoritas mutlaknya Muslim, penghapusan sejumlah ketentuan halal juga berpotensi menjauhkan realisasi program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara unggulan dalam produk halal, serta dapat mendistorsi keunggulan Indonesia di bidang industri halal global.

**SELANJUTNYA ►**



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# Dukung Tambahkan Anggaran BNPB, Surahman Hidayat Tekankan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana



**Jakarta (06/02) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, menyambut baik adanya tambahan anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2026.**

“Penambahan anggaran ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, serta penanganan bencana yang semakin kompleks di Indonesia,” ujar Surahman.

Surahman mengatakan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI telah mendesak Kepala BNPB untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti sejumlah masukan. Di antaranya memperkuat kerja sama dengan relawan tanggap bencana di berbagai daerah, mempercepat penyediaan layanan dasar kepada masyarakat terdampak bencana, meningkatkan mitigasi bencana di daerah rawan agar masyarakat memiliki ketangguhan dan kesiapsiagaan, meningkatkan penyediaan sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta mendorong digitalisasi data penanganan kebencanaan guna memastikan kebutuhan korban terdampak bencana tepat sasaran.

“Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI juga mendesak BNPB untuk membuat standar minimal kebutuhan peralatan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana di tiap daerah, serta meningkatkan sosialisasi kepada daerah-daerah rawan bencana,” kata Surahman.

Surahman juga berpendapat bahwa tambahan anggaran ini harus diarahkan pada peningkatan kapasitas daerah melalui dukungan teknis dan pendanaan bagi BPBD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti logistik, peralatan evakuasi, serta fasilitas penampungan darurat.

“Tambahkan anggaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan sistem peringatan dini agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan akurat sebelum bencana terjadi. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kebencanaan dan pelatihan relawan agar lebih siap menghadapi situasi darurat,” imbuhnya.

Surahman menekankan bahwa tambahan anggaran BNPB bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan merupakan investasi bagi keselamatan rakyat. Dengan dukungan anggaran yang memadai, BNPB diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat respons darurat, serta memastikan pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif.

“Kami berharap tambahan anggaran BNPB digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga dana tersebut benar-benar bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan memastikan negara hadir saat rakyat menghadapi bencana,” ujar Surahman.

Dengan adanya tambahan anggaran tahun 2026, Surahman optimistis BNPB dapat meningkatkan ketangguhan nasional serta memperkuat solidaritas kebangsaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan.



# KOMISI IX

# Tanggapi Pemecatan Dokter Jantung Anak ASN, Ru'yat Minta Kemenkes Bangun Komunikasi Egaliter

Jakarta (23/02) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru'yat, menyalurkan pemberhentian seorang dokter aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus spesialis jantung anak, yaitu dr. Piprim Basarah Yanuarso. Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih sangat membutuhkan tenaga medis, khususnya dokter dengan keahlian spesialis yang jumlahnya terbatas.



Menurut Ru'yat, dalam situasi kebutuhan layanan kesehatan yang tinggi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan seharusnya mengedepankan komunikasi yang setara dan pembinaan, bukan langsung mengambil langkah pemecatan.

“Terkait dengan pemberhentian dokter ASN, dokter jantung anak, Indonesia sangat membutuhkan tenaga medis. Tentu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan seharusnya melakukan komunikasi yang egaliter, yang equal, melakukan proses pembinaan sehingga jangan sampai terjadi pemecatan,” ujar Ru'yat kepada awak media.

Ia mengakui bahwa secara aturan, pihak Kementerian Kesehatan maupun rumah sakit memiliki argumentasi masing-masing. Namun, menurutnya, aspek komunikasi dan pengelolaan respons publik tetap harus menjadi perhatian serius.

“Kami sangat menyayangkan, meskipun memang betul secara aturan pihak Kementerian Kesehatan punya argumentasi, pihak rumah sakit juga demikian. Saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Menteri, Pak Budi Gunadi Sadikin, dan juga Pak Wamen untuk memperbaiki pola komunikasi sehingga tidak ada kegaduhan secara sosial,” ungkapnya.

Ru'yat menekankan pentingnya menjaga kondusivitas sosial dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, kebijakan yang menyangkut figur publik seperti dokter spesialis rentan memicu reaksi luas di tengah masyarakat.

“Dalam konteks pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini harus dijaga dan dibangun kondusivitas sosial, termasuk reaksi publik. Karena itu saya menyampaikan kepada Pak Menkes dan Pak Wamen Kesehatan agar dibangun pola komunikasi terbaik dan dilakukan pembinaan terbaik,” katanya.

Lebih lanjut, Ru'yat mengingatkan bahwa sistem karier ASN dibangun melalui proses panjang dan berbasis merit. Oleh sebab itu, keputusan pemberhentian yang terkesan cepat terhadap dokter di usia produktif dinilai berpotensi merugikan bangsa.

“Karier planning dalam merit system ASN itu sangat panjang, perjuangannya dari bawah dengan bekerja keras. Kemudian serta-merta di usia yang sangat produktif dipecat. Jadi Indonesia kehilangan perjuangan dokter spesialis jantung anak,” tegasnya.

Ia berharap ke depan setiap persoalan serupa dapat diselesaikan melalui pendekatan dialogis, proporsional, dan mengedepankan kepentingan pelayanan kesehatan nasional, sehingga potensi anak bangsa tetap dapat diberdayakan untuk kemaslahatan masyarakat luas.



# Soroti Lonjakan Peserta BPJS Nonaktif, Muh. Haris Dorong Perbaiki Data Nasional

Jakarta (19/02) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh. Haris, menyoroti tingginya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus nonaktif, meskipun cakupan kepesertaan secara nasional telah mencapai angka yang sangat tinggi. Hal tersebut disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Muh. Haris menyampaikan apresiasi atas capaian cakupan kepesertaan JKN yang telah menjangkau mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil koordinasi Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan pada 11 Februari lalu. "Kita apresiasi, sudah tercakup JKN itu 98 persen atau sekitar 284 juta jiwa penduduk Indonesia," ujar Muh. Haris.



Namun demikian, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya jumlah peserta yang berstatus nonaktif, yang mencapai 63,3 juta jiwa. Bahkan, angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Yang nonaktif itu begitu banyak, ada 63,3 juta, naik 28 juta dibanding tahun 2025 yang lalu. Sehingga menyebabkan terjadi penolakan di daerah, di rumah sakit-rumah sakit terhadap pasien-pasien yang nonaktif itu," jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta yang membutuhkan layanan medis namun terkendala status kepesertaan yang tidak aktif. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi IX DPR RI bersama pemerintah dan BPJS Kesehatan telah menyepakati langkah perbaikan, termasuk memastikan tidak ada lagi penolakan pasien dalam masa transisi perbaikan data.

"Kita sepakat dalam rapat itu agar tidak ada lagi penolakan dalam waktu tiga bulan ke depan, yaitu Maret, April, dan Mei, sembari perbaikan menuju data tunggal sosial ekonomi nasional," tegasnya.

Muh. Haris menjelaskan bahwa pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi langkah strategis untuk menyatukan berbagai basis data yang selama ini tersebar di berbagai instansi, sehingga penentuan kepesertaan JKN menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

Ia berharap dengan adanya pembaruan sistem data dan komitmen bersama dari pemerintah serta BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat berjalan lebih optimal tanpa diskriminasi atau penolakan.

# Netty Prasetiyani Soroti Penindakan Pelanggaran TKA, Dorong Pengawasan Berkelanjutan dan Transparan



**Jakarta (26/02) --- Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menanggapi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menindak 12 perusahaan karena pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan total denda Rp4,48 miliar.**

Netty menilai langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan, sekaligus menjaga rasa keadilan bagi tenaga kerja dalam negeri. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Kita mengapresiasi langkah penindakan yang telah dilakukan pemerintah. Ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan aturan. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan pengawasan berjalan terus-menerus, tidak hanya bersifat insidental,” ujar Netty, Kamis (26/2).

Menurutnya, isu penggunaan TKA merupakan isu sensitif di tengah masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan tenaga kerja nasional.

Netty juga mendorong agar pemerintah memperkuat transparansi data terkait penggunaan TKA, termasuk jenis pekerjaan yang diisi serta dasar kebutuhan tenaga asing tersebut. “Transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat perlu mendapatkan kejelasan bahwa TKA yang masuk memang mengisi posisi yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar skema sanksi dan denda benar-benar memberikan efek jera bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Evaluasi berkala terhadap besaran denda dan kepatuhan perusahaan dinilai perlu dilakukan. “Kita ingin memastikan bahwa penegakan aturan berjalan adil, tenaga kerja Indonesia terlindungi, dan dunia usaha tetap memiliki kepastian hukum,” tutup Netty.



# KOMISI X

# Duka untuk Anak di NTT, Kurniasih: Jangan Ada Korban Lagi!

Jakarta (09/02) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang ibu, Kurniasih mengaku peristiwa ini menyayat hati dan menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak tentang kondisi anak-anak didik di dunia pendidikan.

“Sebagai seorang ibu, saya tidak bisa membayangkan betapa berat beban yang dirasakan ibu dan putranya. Anak seusia itu seharusnya tumbuh dengan rasa aman, bermain, dan belajar dengan gembira, bukan memikul tekanan hidup yang melampaui usianya,” ujar Kurniasih.

Menurutnya, tragedi ini tidak boleh dipandang sebagai kasus individual semata, melainkan cermin adanya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang secara ekonomi masih tertinggal. Pendidikan dasar seharusnya menjadi ruang yang menenangkan dan melindungi kondisi psikologis anak, bukan justru menambah tekanan akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

“Kita tidak boleh membiarkan satu pun anak merasa sendirian karena kemiskinan. Anak tidak seharusnya merasa malu, takut, atau tertekan hanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan belajar dasar,” tegasnya.

Komisi X DPR RI, lanjut Kurniasih, mendorong penguatan pemerataan kebutuhan pendidikan agar kebutuhan paling mendasar peserta didik seperti buku pelajaran, alat tulis sekolah, pakaian, dan dukungan pembelajaran dapat diakses tanpa membebani anak maupun orang tua. Selain itu, sekolah perlu menjadi ruang aman secara emosional dengan memperkuat pendampingan psikologis bagi peserta didik.

“Kesehatan mental anak lebih penting dari prestasi akademik. Sekolah harus peka membaca tanda-tanda tekanan psikologis pada anak dan memastikan adanya sistem pendampingan yang nyata, terutama di wilayah-wilayah yang rentan,” tambahnya.

Kurniasih menegaskan, peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi bersama agar kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah, sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk lebih hadir, lebih peduli, dan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak.

“Tidak boleh ada lagi anak yang merasa hidupnya tidak punya harapan karena tidak mampu. Anak-anak kita adalah amanah bangsa, dan sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga mereka, bukan hanya fisiknya, tetapi juga hatinya,” pungkas Kurniasih.



## Ledia Hanifa: RUU Sisdiknas Mendesak Diperbarui untuk Menjawab Tantangan Pendidikan

**Jakarta (10/02) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan pentingnya pembaruan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai respons atas perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah. Hal tersebut disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.**

Ledia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah berlaku lebih dari dua dekade, sementara dinamika dan tantangan pendidikan nasional telah mengalami perubahan signifikan.

“Rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ini menjadi bagian yang sangat penting, karena undang-undangnya sudah 20 tahun, sementara ada perkembangan dalam sistem pendidikan kita,” ujar Ledia.

Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Sisdiknas merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk membentuk satu sistem pendidikan nasional yang utuh.

“Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3), kita perlu membentuk satu sistem pendidikan nasional yang mendorong peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab, dan demokratis,” jelasnya.

Ledia mengungkapkan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas dilakukan melalui pendekatan kodifikasi dan modifikasi, dengan mengintegrasikan sejumlah regulasi yang selama ini berdiri sendiri.

“RUU Sisdiknas ini merupakan gabungan melalui metode kodifikasi dan modifikasi terhadap Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Perguruan Tinggi, serta beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” terang Ledia.

Menurutnya, penggabungan tersebut penting agar pengaturan mengenai guru, dosen, dan tenaga kependidikan dapat disusun secara lebih utuh, sinkron, dan berkeadilan, mengingat sebagian kewenangan guru juga berada

Lebih lanjut, Ledia berharap RUU Sisdiknas mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang selama ini dihadapi, khususnya terkait perlindungan dan kesejahteraan guru serta dosen. di ranah pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan dengan pembangunan konsep yang lebih matang di dalam RUU Sisdiknas ini, semua masalah bisa teratasi, termasuk perlindungan terhadap guru, perlindungan terhadap dosen, dan ke depan juga menyangkut kesejahteraan,” pungkasnya.



# Soroti Sengkarut Zonasi dan Sekolah Inklusi, Fikri Faqih Dorong Peta Jalan Pendidikan yang Baku

**Jakarta (03/02) --- Hilangnya kebanggaan terhadap sekolah negeri akibat ketidakpastian sistem zonasi, tiadanya tolok ukur kualitas standar nasional, serta layanan inklusi yang belum memadai memicu pergeseran preferensi orang tua yang kini lebih memilih sekolah swasta.**

Fenomena eksodus siswa ini menjadi sinyal peringatan keras bagi pemerintah untuk segera membenahi sistem pendidikan nasional, termasuk menyusun cetak biru (blueprint) jangka panjang agar arah pendidikan tidak terus berubah setiap pergantian kepemimpinan.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menilai fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan bentuk frustrasi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan negeri yang dulunya menjadi primadona karena prestasi dan gengsi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2021–2024 mengonfirmasi penurunan jumlah siswa di sekolah negeri jenjang dasar dan menengah, yang berbanding terbalik dengan kenaikan signifikan di sekolah swasta.

Menurut Fikri, kondisi ini terjadi karena orang tua kini mencari kepastian kualitas yang hilang sejak penghapusan Ujian Nasional (UN) dan kacaunya implementasi penerimaan siswa baru.

“Dahulu ada Ujian Nasional yang memperlihatkan peta kualitas sekolah, mana yang bagus dan mana yang kurang. Sekolah negeri rata-rata mendominasi nilai tersebut sehingga menjadi kebanggaan. Namun sekarang, ukuran keberhasilan seorang anak menjadi berkualitas atau tidak menjadi kurang jelas karena tidak ada parameter spesifik atau pembandingan secara nasional,” kata Fikri dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026) di Jakarta.

Selain masalah kualitas yang tak terukur, Fikri menyoroti beban biaya dan sistem zonasi yang kaku sebagai sumber kekecewaan orang tua. Ironisnya, meski sekolah negeri mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pungutan biaya kepada wali murid sering kali hampir setara dengan sekolah swasta.

Ditambah lagi, batasan administratif zonasi kerap menghalangi siswa mengakses sekolah terdekat dari rumah mereka hanya karena perbedaan wilayah, yang memaksa orang tua beralih ke sekolah swasta demi kenyamanan dan kepastian layanan.



SELANJUTNYA ►

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini juga menyoroti ketidaksiapan sekolah negeri dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas.

Fikri mengungkapkan fakta di lapangan bahwa label “sekolah inklusi” sering kali hanya sebatas simbol tanpa dukungan infrastruktur ramah disabilitas maupun tenaga pengajar yang kompeten.

Akibatnya, banyak orang tua anak berkebutuhan khusus terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta atau pesantren agar terhindar dari perundungan dan mendapatkan hak pendidikan yang layak.



“Benar, istilah sekolah inklusi sering kali hanya menjadi simbol. Sekolah mengaku inklusi, tetapi bangunan tidak ramah disabilitas, tidak ada bidang miring atau guiding block bagi tunanetra. SDM atau gurunya pun tidak paham cara memperlakukan penyandang disabilitas, sehingga memicu perundungan,” tandasnya.

Untuk mengatasi carut-marut tersebut, Fikri mendesak pemerintah segera menyusun Rencana Induk Pendidikan Nasional. Ketiadaan peta jalan yang baku membuat kurikulum terus berubah dengan istilah “ganti menteri ganti kurikulum”, yang membingungkan pendidik dan siswa.

Ia membandingkan sektor pendidikan dengan pariwisata yang telah memiliki rencana induk jangka panjang, sementara pendidikan nasional justru berjalan tanpa arah yang jelas, padahal anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN atau setara Rp700 triliun.

Langkah ini diharapkan dapat meluruskan alokasi anggaran agar fokus pada kegiatan belajar mengajar, mengurangi kepadatan kelas, serta mengembalikan kualitas sekolah negeri agar benar-benar gratis dan membanggakan, bukan sekadar alternatif murah dengan fasilitas



## Wafatnya Siswa SD di NTT, Reni Astuti: Alarm bagi Dunia Pendidikan Nasional

Surabaya (06/02) --- Kabar duka wafatnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada akhir Januari lalu menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan Indonesia.

Peristiwa ini menegaskan bahwa masih terdapat persoalan mendasar yang harus segera dibenahi oleh negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya–Sidoarjo), Reni Astuti, menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan alarm keras bagi semua pihak dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Ia menyatakan keprihatinan mendalam serta turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa siswa SD tersebut. “Ini adalah tamparan bagi kita semua. Negara punya tanggung jawab utama dalam memastikan hak pendidikan setiap warga negara terpenuhi,” ujar Reni dalam sela kunjungan kerja di Surabaya, Selasa (4/2/2026).

Sejalan dengan sikap Pimpinan Komisi X DPR RI, Reni mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) sebagai kementerian terkait untuk segera mengambil langkah cepat, terukur, dan serius dalam menangani kasus ini. Menurutnya, pemerintah tidak boleh bersikap reaktif semata, tetapi harus menghadirkan solusi nyata agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Kemdikdasmen dalam hal ini harus segera melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh atas kejadian ini,” tegasnya. Reni menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, dan negara wajib membiayainya.

“Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara sebagaimana amanat UUD 1945,” tegasnya. Selain itu, ia juga mengingatkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

“Kita juga tahu bahwa dalam kondisi ekonomi tidak mampu, warga negara berhak mendapat bantuan khusus sebagaimana amanat UUD,” ujar Reni. Oleh karena itu, menurut Reni, peristiwa ini harus diinvestigasi dan dievaluasi secara menyeluruh agar menjadi bahan perbaikan kebijakan ke depan.

Lebih lanjut, Reni menyampaikan keyakinannya bahwa kejadian ini tidak lepas dari kurangnya kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi siswa. Padahal, berbagai instrumen bantuan telah tersedia, seperti bantuan bagi keluarga miskin serta berbagai program perlindungan sosial lainnya. Namun, bantuan tersebut kerap belum tersebar secara merata.

“Ini harus menjadi momen introspeksi bagi semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun seluruh elemen masyarakat, agar lebih peka terhadap kondisi anak-anak kita,” tambahnya. Reni berharap tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak boleh meninggalkan satu pun warga negara.

“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena negara lalai menjalankan amanat konstitusi,” pungkasnya.



# KOMISI XI

# Menkeu Purbaya Pastikan Pembiayaan PBI BPJS Kesehatan, PKS: Kita Dukung dan Perbaiki Data!



Jakarta (11/02) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan pemerintah yang siap membayar iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kepastian ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. “Kami dukung penerusan Menkeu Purbaya bahwa anggaran PBI tidak mengalami pemotongan dan siap membayar iuran BPJS bagi PBI,” tegas Kholid. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS itu melanjutkan bahwa rakyat butuh ketegasan pemerintah dalam menempatkan perlindungan sosial, khususnya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan, sebagai prioritas.

“Rakyat butuh kepastian dan ketegasan soal layanan kesehatan jadi prioritas,” ujar Kholid lagi. Kholid memandang langkah Menkeu tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga. Dalam konteks tata kelola kebijakan, kepastian anggaran harus menjadi pegangan bersama seluruh kementerian dan lembaga agar tidak terjadi kebingungan di lapangan yang berujung pada terhambatnya akses layanan kesehatan.

“Kebijakan Menkeu Purbaya ini harus betul-betul diimplementasikan di lapangan. Kita semua harus mengawalinya,” tegas Kholid. Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok–Kota Bekasi) mengungkapkan keresahan rakyat soal ini akibat data yang tidak akurat. Karena itu, masa transisi selama tiga bulan yang dijamin pembiayaannya oleh pemerintah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki akurasi data PBI.

“Rakyat resah soal PBI ini. Untuk itu, perbaikan harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan agar tidak ada masyarakat yang terputus dari layanan hanya karena persoalan administratif,” kata Kholid.

Selain itu, PKS menilai pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi publik antarinstansi terkait. Penjelasan yang jelas dan tepat waktu kepada masyarakat akan membantu mencegah kesalahpahaman serta menjaga ketenangan publik dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan.

“Ke depan, yang tak kalah penting adalah memastikan kebijakan ini dijalankan dengan koordinasi yang baik dan komunikasi yang manusiawi, sehingga hak jaminan kesehatan rakyat benar-benar terlindungi,” tutup Kholid.



## Polemik LPDP, Habib Idrus Tekankan Akuntabilitas dan Kontribusi Alumni

**Jakarta (22/02) --- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri, menilai polemik pernyataan salah satu penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP perlu disikapi secara serius dan proporsional. Ia mengingatkan agar dinamika tersebut tidak mengaburkan tujuan strategis Dana Abadi Pendidikan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia unggul.**

Menurut Habib Idrus, LPDP bukan sekadar program pembiayaan kuliah. Program tersebut merupakan investasi jangka panjang negara untuk mencetak generasi yang kelak kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.

“Beasiswa LPDP bukan hanya soal biaya kuliah. Ini adalah investasi masa depan Indonesia. Di dalamnya ada amanah pengabdian,” ujar Habib Idrus pada keterangannya, Minggu (22/2).

Ia menjelaskan, seluruh pembiayaan penerima LPDP bersumber dari Dana Abadi Pendidikan yang dikelola negara. Dukungan tersebut meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, hingga fasilitas pendukung lain yang nilainya tidak kecil.

“Setiap penerima beasiswa LPDP menerima dukungan pembiayaan yang tidak kecil, mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, hingga fasilitas pendukung lainnya. Seluruhnya dibiayai oleh uang rakyat dan dirancang untuk melahirkan kontribusi nyata baik dalam bentuk keilmuan, kebijakan, inovasi, maupun pengabdian sosial setelah studi selesai” ujarnya.

Habib Idrus mengingatkan, pernyataan publik yang terkesan meremehkan ikatan kebangsaan dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Padahal, kepercayaan publik menjadi fondasi utama keberlanjutan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.

Ia menegaskan negara menghormati dinamika global serta pilihan hidup personal setiap individu. Namun, penerima beasiswa negara diharapkan menjaga sikap dan pernyataan yang mencerminkan rasa hormat serta tanggung jawab moral kepada bangsa.

Habib menilai momentum polemik ini seharusnya menjadi penguat orientasi strategis program. Evaluasi tidak hanya berfokus pada isu sesaat, tetapi pada perbaikan tata kelola jangka panjang.

“Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu posisi Indonesia. Dana Abadi Pendidikan dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepemimpinan global,” ujar Habib Idrus di Jakarta.

**SELANJUTNYA ►**

Ia menjelaskan, nilai Dana Abadi Pendidikan telah mencapai ratusan triliun rupiah sebagai bagian dari strategi fiskal berkelanjutan. Hasil pengelolaan dana tersebut membiayai ribuan penerima beasiswa setiap tahun, baik di dalam negeri maupun di berbagai perguruan tinggi dunia.

Sebagai mitra pengawasan kebijakan fiskal, Komisi XI DPR RI mendorong penguatan tata kelola LPDP secara berkala. Seleksi dinilai perlu memperhatikan tidak hanya prestasi akademik, tetapi juga komitmen kebangsaan serta kewajiban pengabdian pascastudi.

“Penguatan tata kelola, transparansi, dan mekanisme pemantauan kontribusi alumni menjadi bagian dari upaya menjaga agar investasi besar negara ini benar-benar berdampak pada peningkatan daya saing Indonesia,” katanya.

Habib menambahkan, mobilitas internasional dalam era globalisasi merupakan hal yang wajar. Namun, kesempatan tersebut semestinya dimaknai sebagai tanggung jawab moral untuk memberi nilai tambah bagi bangsa.

“Dana Abadi Pendidikan adalah amanah rakyat sekaligus strategi masa depan. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola menjadi investasi produktif untuk kemajuan Indonesia di panggung dunia,” ujar Habib Idrus.



# Amin Ak Tegaskan Implementasi Perjanjian Dagang Indonesia-AS Harus Sejalan dengan Kepentingan Nasional

**Jakarta (25/02) — Perjanjian dagang internasional harapannya melahirkan optimisme dengan terbukanya akses pasar terbuka, investasi diharapkan meningkat, dan ekspor diproyeksikan tumbuh.**

Namun, pengalaman global menunjukkan bahwa justru setelah kesepakatan ditandatangani, proses pengujian yang sesungguhnya dimulai. Hal inilah yang kini menyertai implementasi Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Hal itu diingatkan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Lebih lanjut ia mengatakan, perkembangan terbaru di Amerika Serikat turut memberi dimensi baru. Putusan Supreme Court of the United States yang membatasi kewenangan tarif pemerintah federal menunjukkan bahwa fondasi politik suatu perjanjian dagang dapat berubah mengikuti dinamika domestik negara mitra.

Secara hukum, perjanjian tetap berlaku. Namun, secara politik dan ekonomi, keseimbangan daya tawar bisa mengalami penyesuaian.

“Bagi Indonesia, situasi ini perlu dibaca secara jernih dan strategis. Perubahan global tersebut bukan alasan untuk meragukan kerja sama internasional, melainkan momentum untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan implementasi perjanjian berjalan sejalan dengan kepentingan nasional,” beber Amin.

Menurutnya, perjanjian dagang modern tidak lagi sekadar mengatur tarif dan arus barang. Di dalamnya terkandung pengaturan yang menyentuh tata kelola regulasi, ekonomi digital, standar industri, hingga arah kebijakan pembangunan domestik.

Karena itu, pembacaan terhadap perjanjian harus dilakukan secara komprehensif, bukan parsial.



SELANJUTNYA ►

Salah satu perhatian utama adalah komitmen pembelian produk Amerika Serikat dalam nilai yang signifikan. Dalam perspektif diplomasi ekonomi, langkah tersebut dapat memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Namun, pada saat yang sama, implementasinya harus tetap menjaga agenda strategis nasional, khususnya ketahanan pangan dan perlindungan terhadap sektor produksi dalam negeri.

“Indonesia saat ini tengah mendorong penguatan swasembada pangan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan kapasitas produksi domestik menjadi faktor kunci,” tegasnya

Kebijakan perdagangan, menurut Amin, seyogiannya memperkuat petani dan pelaku usaha nasional, bukan justru menambah tekanan baru. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengaturan ekonomi digital dan arus data lintas negara. Pasar digital Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di kawasan, sehingga setiap komitmen internasional di bidang ini akan berdampak langsung terhadap masa depan industri teknologi nasional.

“Negara perlu tetap memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk memastikan nilai ekonomi digital juga dinikmati pelaku usaha domestik,” ujarnya. Para ekonom sering menyebut risiko ini sebagai regulatory lock-in, yaitu kondisi ketika komitmen internasional berpotensi membatasi fleksibilitas kebijakan nasional di masa depan.

Karena itu, pengawasan implementasi menjadi sama pentingnya dengan proses negosiasi awal. Wakil Ketua Fraksi PKS itu menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah pemerintah dalam memperluas kerja sama ekonomi global. Namun, dukungan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab konstitusional DPR untuk memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Pendekatan ini mencerminkan sikap konstruktif bahwa kerja sama internasional diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, tetapi transparansi, kehati-hatian, dan evaluasi berkelanjutan tetap menjadi prasyarat utama. Dalam konteks yang lebih luas, perubahan lanskap perdagangan global justru membuka peluang besar bagi Indonesia. Dunia sedang mencari pusat pertumbuhan baru dan diversifikasi rantai pasok. Indonesia memiliki posisi strategis untuk memanfaatkan momentum tersebut melalui peningkatan daya saing industri, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan konsistensi kebijakan ekonomi.

Pada akhirnya, pertanyaan utama bukan sekadar apakah perjanjian ini menguntungkan atau merugikan. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia mengelola implementasinya. Dengan pengawasan yang kuat, koordinasi kebijakan yang matang, serta keberpihakan pada kepentingan nasional, kerja sama perdagangan dapat menjadi instrumen penguatan kedaulatan ekonomi. “Kita harus bisa memastikan setiap peluang global benar-benar diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.





# **KOMISI XII**



## Jalal Abdul Nasir Dorong Sinergi Holding- Subholding Perkuat Sektor Hulu Migas

**Bali (25/02) — Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Provinsi Bali telah dimanfaatkan untuk memperdalam penguatan sektor hulu minyak dan gas bumi sebagai fondasi ketahanan energi nasional di berbagai wilayah Indonesia.**

Pertemuan dilakukan bersama PT Pertamina (Persero) selaku holding, subholding downstream yang telah dilebur, Pertamina Hulu Energi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa dari sisi pasokan energi fosil, bahan bakar minyak dan LPG 3 kilogram tetap menjadi kebutuhan vital masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

Peningkatan konsumsi bahan bakar minyak umumnya terjadi akibat arus mudik, mobilitas masyarakat, serta distribusi logistik di berbagai wilayah Indonesia.

“Saya mendorong Pertamina Hulu Energi meningkatkan porsi lifting gas untuk memperkuat ketahanan energi masa depan,” ujar Jalal Abdul Nasir, anggota Komisi XII dari Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.

Kinerja Pertamina Hulu Energi sebagai subholding hulu dinilai strategis dalam menjaga kesinambungan pasokan energi, terutama dalam menghadapi dinamika kebutuhan domestik dan agenda transisi energi nasional.

“Gas memiliki peran penting dalam bauran energi. Karena itu, peningkatan produksi dan optimalisasi lapangan harus terus didorong secara terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.

Transformasi korporasi di lingkungan PT Pertamina (Persero) juga disoroti sebagai bagian dari penguatan daya saing industri energi nasional melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi operasional.

“Saya mendorong holding terus meningkatkan tata kelola, efisiensi, dan digitalisasi agar kinerja perusahaan semakin sehat dan akuntabel,” ungkapnya.

Sinergi antara holding dan subholding dinilai perlu terus diperkuat guna memastikan proses bisnis berjalan efektif serta mampu menjawab tantangan investasi dan teknologi di sektor hulu.

**“Saya juga mendorong Pertamina Hulu Energi menggandeng PT DSAW sebagai produsen pipa minyak dan gas bumi lokal agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan nilai tambah ekonomi nasional semakin meningkat,” tutupnya.**



## Ateng Sutisna Kritik Klaim Investasi Pemerintah: Jangan Hanya Komitmen, Rakyat Butuh Realisasi

**Jakarta (04/02) --- Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mempertanyakan validitas capaian target investasi nasional yang disampaikan pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Deputi Bidang Investasi dan Hilirisasi Kementerian Investasi/BKPM, Selasa, 3 Februari 2026.**

Dalam forum tersebut, Ateng menekankan pentingnya membedakan antara capaian investasi yang benar-benar telah terealisasi dengan investasi yang masih sebatas rencana atau komitmen di atas kertas.

“Target investasi memang disebut tercapai. Tapi yang perlu diperjelas, apakah itu sudah dalam bentuk realisasi, dananya masuk dan proyeknya beroperasi atau baru berupa komitmen perusahaan untuk berinvestasi,” tegas Ateng.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman di lapangan menunjukkan tidak semua komitmen investasi berujung pada realisasi. Ateng bahkan membagikan pengalamannya sebelum terjun ke dunia politik, saat mendampingi perusahaan asal Inggris yang berencana menanamkan investasi senilai Rp7 triliun di sektor wisata alam Indonesia.

“Seluruh perizinan ditempuh, termasuk izin dari BKPM. Kajian teknis dari berbagai kementerian juga sudah ada. Namun pada praktiknya, berbagai hambatan di lapangan membuat investasi tersebut tidak bisa beroperasi hingga lima tahun, dan akhirnya investor kembali ke negaranya,” ungkapnya.

Menurut Ateng, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting agar pemerintah tidak hanya berfokus pada angka target, tetapi juga memastikan eksekusi investasi berjalan efektif di lapangan.

Selain itu, Ateng juga menyoroti masih rendahnya porsi investasi dalam negeri yang hanya sekitar 26 persen dibandingkan investasi asing. Ia mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam mendorong keterlibatan investor nasional dalam proyek-proyek strategis.

“Untuk proyek besar, mungkin investor dalam negeri belum sepenuhnya mampu dari sisi finansial maupun teknologi. Tapi apakah ada upaya untuk mengawinkan investor dalam negeri dengan perusahaan besar asing agar mereka bisa ikut terlibat dan kapasitas nasional meningkat?” ujarnya.

**SELANJUTNYA ►**

Tak hanya soal realisasi dan komposisi investasi, Ateng juga mengangkat persoalan pengawasan perizinan. Ia menyoroti masih adanya perusahaan yang telah mengantongi izin namun terbukti melanggar ketentuan di lapangan.

“Sejauh mana peran Kementerian Investasi dalam mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang melanggar izin? Apakah kementerian hanya menerbitkan izin, sementara pencabutan dan penindakan sepenuhnya menjadi kewenangan instansi lain?” tanyanya.

Menurut Ateng, kepastian dan konsistensi pengawasan sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan investasi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat.

“Ketika investor sudah berkomitmen, negara juga harus hadir memastikan kepatuhan. Pengendalian dan penindakan terhadap pelanggaran izin harus jelas, tegas, dan terkoordinasi,” pungkasnya.

Dalam RDP ini, Ateng Sutisna menegaskan komitmennya di Komisi XII DPR RI untuk terus mengawal kebijakan investasi dan hilirisasi agar tidak hanya mengejar target angka, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan daerah.



# Komisi XII DPR RI Dorong Komitmen IBC atas Transfer Teknologi dan Keberlanjutan Lingkungan dalam Pengembangan Industri Baterai

Jakarta (02/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly, menegaskan pentingnya komitmen transfer teknologi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan industri baterai, sistem penyimpanan energi (ESS), dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) nasional sebagai bagian dari ekosistem investasi strategis nasional. Penegasan ini disampaikan Junaidi Auly dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi XII DPR RI pada rapat dengar pendapat bersama PT Industri Baterai Indonesia (Indonesia Battery Corporation/IBC) di Jakarta, 2 Februari 2026.



Junaidi menilai bahwa pembangunan pabrik dan realisasi investasi, meskipun krusial, belum cukup untuk menjamin keberlanjutan hilirisasi industri. Keberhasilan sejati, menurutnya, diukur dari kemampuan Indonesia dalam mengakumulasi kapabilitas teknologi domestik yang berjalan seiring dengan pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab. Hal ini mencakup penguasaan rekayasa material, pengembangan cathode active material (CAM), produksi sel baterai, hingga desain dan integrasi battery management system (BMS) serta sistem penyimpanan energi yang efisien dan ramah lingkungan.

“IBC harus diposisikan sebagai simpul pembelajaran, pengembangan teknologi, sekaligus pengarusutamaan standar keberlanjutan industri nasional, bukan sekadar pusat manufaktur. Setiap kemitraan strategis perlu memastikan keterlibatan aktif SDM dan lembaga riset nasional dalam proses desain, produksi, inovasi, serta penerapan praktik industri hijau,” ujar Junaidi.

Lebih lanjut, Junaidi Auly mendorong agar seluruh skema kerja sama dan pembiayaan yang difasilitasi melalui ekosistem BPI Danantara dilengkapi dengan klausul penguatan kapasitas nasional dan komitmen lingkungan. Hal ini mencakup kewajiban pembentukan pusat riset dan pengembangan di dalam negeri, program sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja teknologi tinggi, penerapan standar emisi dan efisiensi energi, serta kolaborasi berkelanjutan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional.

Dalam konteks transisi energi dan penguatan sistem tenaga surya serta penyimpanan energi, IBC diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan standar nasional baterai dan ESS yang tidak hanya sesuai dengan karakteristik iklim dan kebutuhan pasar domestik, tetapi juga memenuhi prinsip keselamatan, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini dipandang strategis untuk mendorong lokalisasi rantai pasok bernilai teknologi tinggi, seperti komponen BMS, integrasi inverter, dan sistem keselamatan energi berbasis standar hijau.

Junaidi menekankan bahwa integrasi ekonomi sirkular dan teknologi daur ulang harus menjadi bagian dari agenda transfer teknologi jangka panjang. Upaya ini dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan pasokan material kritis, menekan dampak lingkungan, serta membangun kedaulatan industri energi nasional yang berdaya saing global.

Dengan demikian, Junaidi Auly menegaskan bahwa sinergi antara IBC sebagai pelaksana industrial dan BPI Danantara sebagai arsitek investasi strategis diharapkan mampu mendorong transformasi Indonesia dari basis manufaktur menuju pusat pengembangan teknologi dan praktik industri berkelanjutan dalam rantai nilai global baterai dan energi terbarukan.

# Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Meitri Citra Wardani Tekankan Sinkronisasi Program KLH dan Target Energi Nasional

**Jakarta (04/02) --- Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyatakan dukungan serta kesiapan pengawasan terhadap peluncuran gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.**

Meitri menilai gerakan ini merupakan manifestasi nyata dari upaya pemerintah untuk menjawab ancaman overcapacity Tempat Pembuangan Akhir (TPA) nasional yang diprediksi terjadi pada 2028. Ia menegaskan Gerakan Indonesia ASRI harus menjadi jembatan penghubung antara budaya masyarakat dan kebijakan teknis di Kementerian Lingkungan Hidup.

“Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar aksi bersih-bersih atau korve rutin. Ini adalah momentum emas untuk menyinkronkan program pemberdayaan masyarakat di Kementerian Lingkungan Hidup dengan target besar Presiden. Kita harus memastikan budaya bersih ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai di tingkat bawah,” ujar Meitri dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/2). Sebagai anggota DPR di komisi yang membidangi energi dan lingkungan hidup, Meitri memberikan catatan khusus terhadap rencana pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy). Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen Komisi XII dalam mendorong bauran energi baru dan terbarukan (EBT).

“Angka 34 proyek untuk 34 kota merupakan target yang ambisius namun sangat diperlukan. Kami di Komisi XII akan memastikan program ini terakomodasi dalam peta jalan Kementerian Lingkungan Hidup dan bermitra dengan sektor energi agar sampah benar-benar bertransformasi menjadi sumber daya ekonomi. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti landfill yang hanya memindahkan masalah ke masa depan,” tegas Meitri.

Terkait arahan Presiden mengenai penataan baliho dan program gentengisasi, Meitri memandangnya sebagai langkah penting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari sisi estetika dan kesehatan lingkungan. “Pesan Presiden mengenai karat sebagai lambang degenerasi atau kemunduran merupakan kritik tajam terhadap tata kota kita selama ini. Kami mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan alokasi anggaran penegakan hukum dan pengawasan lingkungan guna memastikan ruang publik kembali asri, sehat, dan indah sesuai visi besar Presiden,” tambahnya.

Anggota Panitia Kerja Lingkungan Hidup ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup segera memaparkan detail teknis implementasi Gerakan Indonesia ASRI dalam rapat kerja mendatang bersama Komisi XII. “Komisi XII akan mengawal agar realokasi anggaran dan program berbasis masyarakat yang telah dipaparkan Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya benar-benar diarahkan untuk menyukseskan gerakan ini. Indonesia yang ASRI adalah hak setiap warga negara, dan tanggung jawab kita adalah memastikan kebijakan ini mendarat tepat di masyarakat,” pungkasnya.





# **KOMISI XIII**

# Hamid Noor Yasin Tegaskan Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM Pemasarakatan Jadi Kunci Implementasi KUHAP Baru



**Jakarta (20/02) --- Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemasarakatan, khususnya dari aspek kapasitas kompetensi dan integritas, menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi KUHAP baru yang berorientasi pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif.**

Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasarakatan di bawah Kementerian Imipas di Jakarta.

Menurut Hamid Noor Yasin, perubahan paradigma hukum acara pidana menuntut transformasi mendasar pada kualitas petugas pemasarakatan.

“Pendekatan rehabilitatif dan restoratif tidak akan berjalan optimal tanpa SDM yang memiliki kompetensi profesional sekaligus integritas yang kuat. Petugas lapas dan pembimbing kemasyarakatan bukan hanya penjaga, tetapi aktor utama dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan,” ujarnya.

Ia menyoroti sejumlah tantangan struktural yang dihadapi pemasarakatan, antara lain overcrowding lapas sebesar lebih dari 88 persen, kemudian kekurangan SDM yang hanya 2.600 dari kebutuhan yang semestinya 16.422. Dengan jumlah penghuni lapas mencapai 274.279 dari kapasitas yang semestinya hanya 146.260 warga binaan, rasio petugas lapas dan narapidana saat ini berkisar 1:34.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada keterbatasan pengawasan, pembinaan individual, serta efektivitas program rehabilitasi. Karena itu, peningkatan jumlah SDM harus diiringi dengan peningkatan kualitas kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan etika profesi, serta sistem evaluasi kinerja yang berbasis integritas.

**SELANJUTNYA ►**

“Kompetensi teknis saja tidak cukup. Integritas menjadi fondasi utama agar proses pembinaan berjalan objektif, bebas penyimpangan, dan berorientasi pada pemulihan perilaku warga binaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hamid Noor Yasin menekankan bahwa penguatan integritas aparaturnya juga penting untuk menjawab tantangan overcrowding lapas yang masih tinggi, sekitar 88 persen. Menurutnya, petugas dengan kompetensi dan integritas yang kuat akan mampu menjalankan strategi pembinaan, asesmen risiko, dan program reintegrasi sosial secara lebih efektif, sehingga tekanan terhadap kapasitas lapas dapat berkurang.

Komisi XIII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menyusun roadmap peningkatan SDM secara komprehensif, mencakup rekrutmen berbasis merit, pelatihan kompetensi rehabilitatif dan restoratif, penguatan pengawasan internal, serta penegakan kode etik guna membangun kultur organisasi yang profesional dan berintegritas.

“Reformasi pemasyarakatan tidak cukup hanya dengan perubahan regulasi. Kunci utamanya ada pada manusia yang menjalankan sistem tersebut. Karena itu, investasi terbesar harus diarahkan pada peningkatan kompetensi dan integritas SDM pemasyarakatan,” demikian pungkasan Hamid Noor Yasin.





## Cegah Child Grooming di Era Digital, DPR Tekankan Peran Keluarga dan Sekolah Jadi Garda Terdepan

Jakarta (03/02) --- Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak di tengah meningkatnya kasus kejahatan digital, khususnya child grooming, yang semakin marak di Indonesia.

Hal itu disampaikan Meity usai rapat Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam rapat tersebut, LPSK menyampaikan sejumlah pengaduan kasus yang membutuhkan penanganan cepat serta kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum (APH).

Meity mengatakan, kompleksitas kasus kejahatan terhadap anak menuntut negara untuk bergerak lebih cepat, baik dari sisi regulasi maupun mekanisme perlindungan korban.

“Kasus-kasus yang ada di negara kita ini sangat serius, salah satunya child grooming. Bahkan tadi sudah ada beberapa korban yang hadir langsung,” ujar Meity kepada wartawan, Senin (2/2/2026).

Politisi PKS tersebut menilai era digital membawa tantangan baru dalam perlindungan anak. Banyak korban berasal dari interaksi di ruang digital yang tidak diawasi dengan baik.

“Sekarang ini eranya digital. Korbannya banyak dari situ. Maka perlindungan dan pengawasan harus diperkuat,” katanya.

Selain regulasi, Meity menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan yang dimulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan ke sekolah. Ia menilai keluarga merupakan garda terdepan dalam mencegah anak terpapar bahaya digital.

Ia juga mengusulkan pembentukan layanan pengaduan satu atap di sekolah-sekolah guna mempermudah korban melaporkan kasus tanpa harus berpindah-pindah tempat.

“Kalau sistemnya satu atap, korban tidak perlu berkeliling. Ini penting agar korban merasa aman dan terlindungi,” jelasnya.

Meity menutup dengan menegaskan bahwa perlindungan anak di era digital harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keluarga, sekolah, hingga negara.

“Semua harus dikawal dari keluarga terlebih dahulu, dan bahaya digitalisasi itu wajib diawasi bersama,” tegasnya.

# Yanuar Arif Wibowo Dorong Kalapas Kelola Pidana Kerja Sosial Secara Kolaboratif



**Jakarta (04/02) --- Anggota DPR RI Komisi XIII, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan pentingnya kesiapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam mengelola pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang baru.**

Menurut Yanuar, pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pemidanaan alternatif yang menitikberatkan pada aspek rehabilitatif dan reintegratif bagi warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, peran Kepala Lapas (Kalapas) menjadi sangat strategis dalam memastikan implementasi pidana kerja sosial dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kerja sosial sebagai pidana alternatif membutuhkan pengelolaan yang serius dan terintegrasi. Kalapas tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus menjalin kerja sama yang lebih baik dengan kepala daerah serta aparat penegak hukum,” ujar Yanuar.

Ia menekankan bahwa sinergi antara Lapas, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial bagi warga binaan. Kerja sama tersebut diperlukan mulai dari penentuan lokasi kerja sosial, pengawasan pelaksanaan, hingga evaluasi manfaatnya bagi masyarakat.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, Anggota DPR Dapil Jateng 8 (Banyumas - Cilacap) ini mengusulkan agar Kepala Lapas dapat dilibatkan secara resmi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Dengan masuknya Kalapas dalam Forkopimda, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan di daerah akan lebih solid. Tujuannya jelas, agar implementasi pidana kerja sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU KUHP dapat berjalan dengan baik, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Yanuar berharap langkah ini dapat memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, sekaligus mendukung tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pembinaan warga binaan.



# **ALAT KELENGKAPAN DEWAN**

# PKS Tegaskan Independensi BPKH dan Perlindungan Jamaah dalam Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

Jakarta (19/02) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyampaikan Pendapat Mini Fraksi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pendapat tersebut disampaikan oleh Anggota Baleg DPR RI F-PKS, Rizal Bawazier, pada Rabu (18/2/2026).

Dalam penyampaian, Rizal menegaskan bahwa revisi UU ini merupakan momentum penting untuk memastikan dana haji dikelola secara amanah, profesional, dan sepenuhnya berpihak kepada jamaah.

“Fraksi PKS memandang bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji merupakan langkah penting dalam menjamin pengelolaan dana haji yang amanah, transparan, dan akuntabel,” ujar Rizal di hadapan pimpinan dan anggota Baleg.

F-PKS menegaskan bahwa perubahan regulasi ini harus tetap sejalan dengan prinsip syariah, menjaga akuntabilitas, serta mendorong pemanfaatan dana yang produktif dan berkeadilan bagi kemaslahatan umat. Terkait substansi RUU, Rizal menyampaikan enam catatan penting Fraksi PKS.

“Pertama; Fraksi PKS memandang bahwa ketentuan mengenai kedudukan dan independensi kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu diperjelas. Khususnya pada formulasi ‘bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri’ agar secara tegas membedakan antara tanggung jawab administratif dan independensi dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan. Tanggung jawab melalui Menteri seharusnya bersifat koordinatif dan administratif belaka. Dengan demikian, Menteri tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi keputusan investasi, penempatan dana, maupun kebijakan keuangan haji.”

Menurut F-PKS, penguatan rumusan tersebut esensial untuk menjamin pemenuhan fiduciary duty BPKH terhadap jamaah sebagai pemilik dana haji.

“Kedua; Fraksi PKS menilai bahwa ketentuan akuntabilitas dan pelaporan berlapis berpotensi menimbulkan fragmentasi standar evaluasi serta beban birokrasi yang berlebih, sehingga perlu diintegrasikan dalam satu sistem laporan utama BPKH yang disampaikan kepada Presiden dan DPR sebagai dasar pengawasan Badan Supervisi, guna menjaga transparansi tanpa menghambat efektivitas kelembagaan.”

F-PKS juga menekankan perlunya kejelasan indikator peningkatan nilai manfaat jamaah, batas maksimum biaya operasional, serta larangan distribusi keuntungan kepada pengurus.



**SELANJUTNYA** ▶

## ◀ SEBELUMNYA

“Ketiga; Fraksi PKS berpendapat bahwa relasi antara Badan Pelaksana dan Badan Supervisi BPKH memerlukan pembatasan kewenangan pengawasan. Pengawasan harus bersifat evaluatif dan strategis semata, tanpa mencampuri pengambilan keputusan operasional maupun investasi harian.”

Fraksi PKS menegaskan pentingnya komposisi pengawas yang profesional di bidang keuangan dan investasi syariah, serta pembagian pengawasan yang tegas antara internal, DPR, dan auditor eksternal untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

“Keempat; Fraksi PKS menegaskan bahwa dana haji bukanlah dana fiskal negara dan bukan pula dana komersial murni, melainkan dana amanah umat yang harus dikelola secara konservatif, berisiko rendah, serta berorientasi jangka panjang.”

Setiap kebijakan investasi strategis, lanjut Rizal, harus melalui kajian komprehensif dan transparan serta berorientasi pada stabilitas biaya penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan kualitas layanan jamaah.

“Kelima; Fraksi PKS memandang bahwa penguatan perlindungan hukum dan kepastian bagi jemaah haji harus menjadi ruh utama perubahan undang-undang ini.”

Pengaturan mengenai hak jamaah atas informasi, mekanisme pengaduan, serta akses terhadap laporan kinerja BPKH perlu diperjelas secara normatif, termasuk penerapan prinsip keadilan antargenerasi agar manfaat dana haji tetap berkelanjutan bagi calon jamaah di masa mendatang.

“Keenam; Fraksi PKS memandang perlu adanya penegasan pengaturan mengenai Dewan Pengawas BPKH, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Fraksi PKS mengusulkan agar jumlah anggota Dewan Pengawas dibatasi paling banyak 7 (tujuh) orang, guna menjamin pengambilan keputusan yang efektif, kolektif, dan tidak birokratis.”

Rizal menambahkan bahwa anggota Dewan Pengawas wajib memiliki kompetensi relevan di bidang ekonomi syariah, keuangan syariah, dan pengelolaan dana haji dengan pengalaman minimal lima tahun serta rekam jejak integritas yang teruji.

Di akhir penyampaiannya, F-PKS menyatakan persetujuan atas hasil harmonisasi RUU untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan berikutnya.



# BKSAP DPR RI Kecam Perluasan Kendali Israel di Tepi Barat



Jakarta (24/02) --- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama 18 menteri luar negeri negara lain dan sejumlah organisasi Islam internasional yang mengecam perluasan kendali Israel di Tepi Barat. Langkah tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional serta bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.

BKSAP DPR RI memandang bahwa tindakan Israel tersebut semakin menegaskan adanya pola kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat perdamaian dan penyelesaian konflik secara adil. Perluasan wilayah di kawasan pendudukan bukan hanya memperburuk situasi kemanusiaan, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap proses perdamaian yang selama ini diperjuangkan masyarakat internasional.

Syahrul Aidi Maazat selaku Ketua BKSAP DPR RI menegaskan bahwa sikap tegas Indonesia di forum internasional harus terus dikawal secara konsisten. "Kami sepakat dengan sikap Menlu RI. Perluasan kendali Israel di Tepi Barat adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dunia tidak boleh menutup mata terhadap kejahatan yang terus berulang dan menghambat terwujudnya kemerdekaan Palestina," ujar anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKS.

BKSAP juga kembali mengingatkan hasil rapat koordinasi terakhir dengan Kementerian Luar Negeri terkait kehati-hatian Indonesia dalam keikutsertaan pada Board of Peace (BoP). Menurut BKSAP, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional harus selalu dipastikan tidak mengaburkan posisi tegas Indonesia terhadap penjajahan serta keberpihakan yang tidak boleh bergeser sedikit pun dari kemerdekaan Palestina.

Lebih lanjut, berbagai langkah sepihak Israel menunjukkan indikasi minimnya komitmen terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan, menurut BKSAP DPR RI. Penyelesaian konflik hanya dapat tercapai apabila ada penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina serta penghentian seluruh bentuk ekspansi di wilayah pendudukan.

BKSAP juga mengingatkan kembali amanat para pendiri bangsa (founding fathers) yang secara tegas menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan seluruh bangsa sebagai bagian dari prinsip konstitusional Indonesia. Palestina, sebagai salah satu negara yang memberikan pengakuan awal terhadap kemerdekaan Indonesia, memiliki posisi historis dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan diplomasi Indonesia.

"Semangat para pendiri bangsa jelas, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dukungan terhadap Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga soal amanah sejarah dan komitmen moral bangsa Indonesia," tutup Ketua BKSAP.

Melalui diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI sebagai second track diplomacy akan terus mendampingi sikap politik luar negeri Indonesia agar tetap konsisten, tegas, dan berpihak pada keadilan serta kemerdekaan rakyat Palestina.



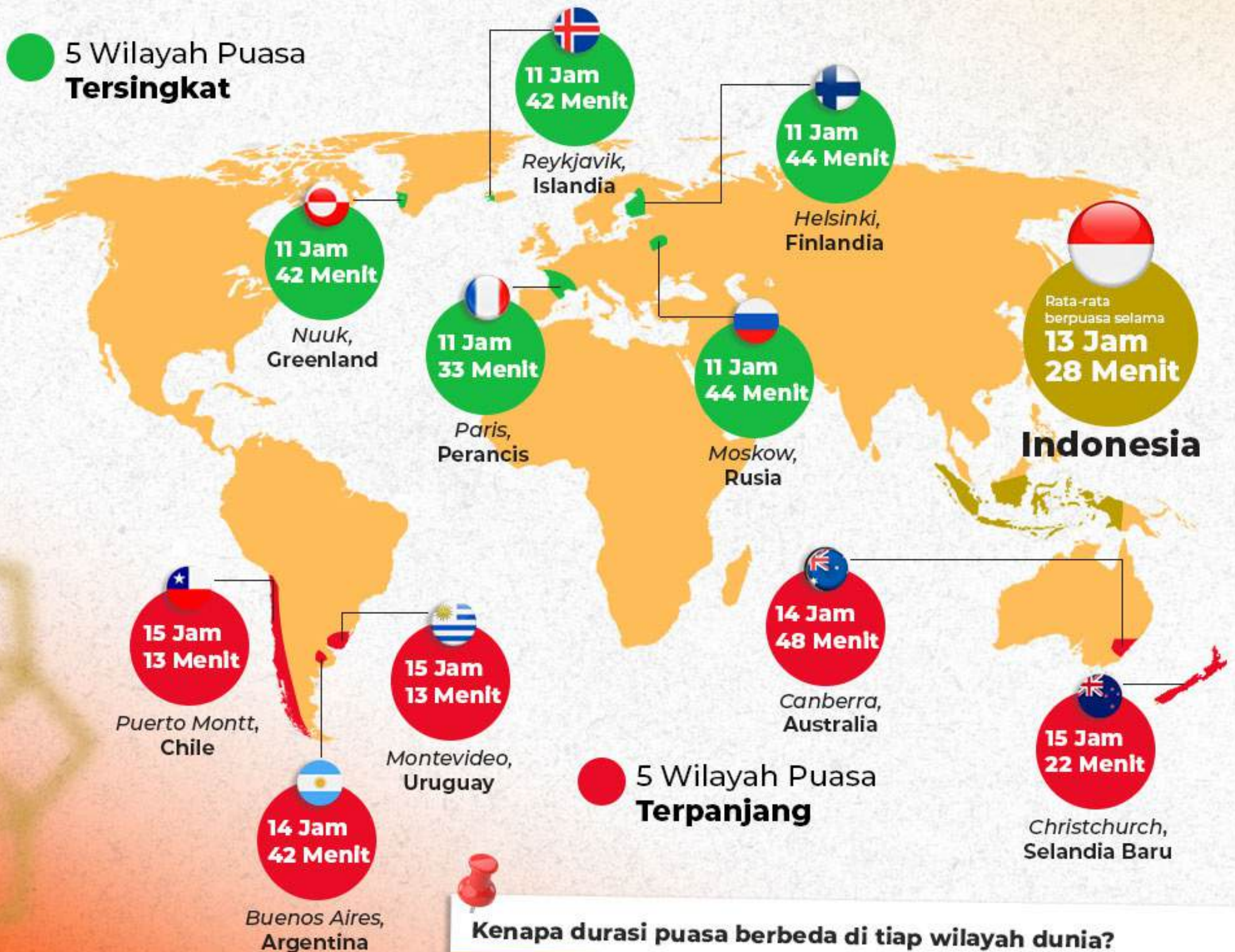
# INFOGRAFIS



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia



# Serba-Serbi WAKTU RAMADAN 1447H DI PENJURU DUNIA



## Kenapa durasi puasa berbeda di tiap wilayah dunia?

- Semakin jauh dari khatulistiwa, jarak siang sampai malam kian **dipengaruhi musim**.
- Ramadan 2026 jatuh jelang **ekuinoks Maret**.
- Menyebabkan negara-negara lintang utara mengalami **hari yang lebih pendek** dibanding negara-negara di lintang selatan.
- Indonesia sebagai negara khatulistiwa diuntungkan dengan panjang siang—malam yang **relatif stabil tiap tahunnya**.

PKS TV DPR RI  
FPKS DPR RI  
fraksipksdprri  
@fpksdprri  
@fraksipksdprri

Sumber data: Kompas, IslamicFinder, Aljazeera, Times of India



**MERAH PUTIH DI BULAN SUCI**  
**83 TAHUN HIJRIAH**  
**KEMERDEKAAN RI**



**NEXT**



# Latar Belakang Proklamasi



Proklamasi Kemerdekaan RI pada Jum'at 17 Agustus 1945 bertepatan dengan **9 Ramadan 1364 H**



Bung Karno mendapat masukan dari KH. Hasyim Asyhari untuk melakukan proklamasi pada **hari Jum'at di bulan Ramadan**



Hari Jum'at merupakan **sayyidul ayyam (rajanya hari)**, sedangkan Ramadan merupakan **sayyidus syuhur (rajanya bulan)**



Momentum Ramadan menegaskan bahwa **perjuangan bangsa meraih kemerdekaan selalu dibarengi semangat keimanan**. Para pejuang menyikapi kemerdekaan sebagai anugerah Ilahi dengan ditambahkan/dimasukkan alinea ke 3 Pembukaan UUD 45 ; Kemerdekaan Indonesia adalah **“Atas berkat rahmat Allah yg Maha kuasa”**

**NEXT**

Foto: wikipedia

PKS TV DPR RI FPKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri @fraksipksdprri

sumber: [lampung.nu.or.id](http://lampung.nu.or.id)



# Peran Tokoh Islam dalam Kemerdekaan

## H.O.S. Tjokroaminoto

Pemimpin Sarekat Islam (SI). Guru bangsa, yang mendidik tokoh pergerakan seperti Soekarno. Memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan, kesadaran ekonomi, dan Islam.



## KH. Ahmad Dahlan

Mendirikan Muhammadiyah pada 1912, berfokus pada pendidikan umat melalui sekolah dan amal islami, membangun karakter nasionalis di kalangan Muslim.



## KH. Hasyim Asy'ari

Mendirikan NU pada 1926, Beliau juga mengeluarkan fatwa "Resolusi Jihad" pada 1945 menegaskan bahwa membela tanah air adalah kewajiban bagi setiap muslim.



## M. Natsir

Ketua Umum Partai Masyumi, pengusul Indonesia kembali ke bentuk Kesatuan menjadi NKRI melalui Mosi Integralnya pd 3 April 1950, setelah sebelumnya berbentuk Serikat dalam Republik Indonesia. Seri



NEXT »



## Bung Tomo

“Pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara... Tuhan akan melindungi kita sekalian.

**Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! MERDEKA!”**

**10 November 1945 di Surabaya**



## Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.



“Dulu, 17 Agustus 1945, bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364H, **proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan**. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka hari ini, 9 Ramadhan 1447H, **83 tahun Hijriyah sudah INDONESIA MERDEKA**. Mari tingkatkan syukur, amal sholih dan taqwa, untuk hadirkan Indonesia Emas 2045.”

foto:mawatu

**NEXT**

PKS TV DPR RI FPKS DPR RI fraksiPKSDPRI @fpksdpri @fraksiPKSDPRI

sumber: fraksiPKS



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# INTEGRITAS UNTUK RAKYAT

MENJADIKAN PENGHARGAAN INDEKS INTEGRITAS  
PARTAI POLITIK (IIPP) 2025 SEBAGAI

## PIJAKAN ADVOKASI DAN PELAYANAN PUBLIK

INTEGRITAS PARTAI POLITIK (IIPP) TAHUN 2025  
PENGUATAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL  
NUJU INDONESIA EMAS 2045

Bali, 11 Februari 2026



NEXT >>

PKS TV DPR RI

FPKS DPR RI

fraksipksdpri

@fpksdpri

@fraksipksdpri

# PKS Raih Skor Tertinggi Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025



Skor Integritas Tertinggi

**PKS**

71

**Rata-Rata  
Nasional**

61,22

Rata-rata nasional berada di kategori “sedang” (61,22), PKS Berhasil melampaui standar tersebut. **Angka ini bukan garis finis, melainkan standar minimum yang harus terus ditingkatkan.**

**NEXT** 



# 5 Pilar Tata Kelola yang dinilai

PKS dinilai unggul dalam membangun sistem, aturan, hingga praktik kelembagaan di kelima sektor ini.



## Kode Etik

Menjaga moralitas kader.



## Demokrasi Internal

Penyaluran aspirasi sehat.



## Kaderisasi

Pembinaan berkelanjutan.



## Rekrutmen

Berbasis merit system.



## Transparansi Keuangan

Akuntabilitas dana publik.



**Partai yang tertib = Kebijakan yang berpihak**

### Integritas Internal

- Kode Etik Kuat
- Rekrutmen Merit
- Demokrasi Sehat
- Transparansi Keuangan



### Dampak Publik

- Mencegah Korupsi
- Pemimpin Kompeten
- Aspirasi Tersalurkan
- Kebijakan Bebas Transaksi



- ▶ PKS TV DPR RI
- f FPKS DPR RI
- @ fraksipksdprri
- @fpkdprri
- @fraksipksdprri




# Integritas : Modal utama Advokasi Kerakyatan


- Demokrasi yang substansial tidak hanya diukur dari pemilu, tapi dari output kebijakan
- Dengan tatakelola yang bersih, PKS memastikan advokasi di parlemen murni untuk kepentingan rakyat


Jika Partai tertib secara internal, maka keputusan politik yang dihasilkan pun akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat

NEXT >>

 PKS TV DPR RI

 FPKS DPR RI

 fraksipksdpri

 @fpksdpri

 @fraksipksdpri



# Kemenangan Kolektif Struktur dan Kader



## Capaian Skor 71

adalah hasil kerja keras seluruh elemen PKS dari tingkat Pusat (DPP) hingga daerah (Ranting). Konsisten Kader dalam menjaga etika dan melayani rakyat adalah kunci utama penilaian ini



## Kontribusi Menuju Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 menuntut demokrasi yang matang dan substansial. Partai Politik adalah pilar utama demokrasi. Tanpa partai yang sehat, negara tidak bisa berlari kencang.



## Produsen Pemimpin Bangsa

Partai adalah tempat lahirnya pemimpin nasional dan daerah. Kualitas partai menentukan kualitas pemimpin masa depan.

 PKS TV DPR RI

 FPKS DPR RI

 fraksipksdprri

 @fpksdprri

 @fraksipksdprri

**NEXT** 



Kami Menerima Penghargaan IIPP 2025 ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugas kami selanjutnya adalah membuktikan bahwa integritas ini berbuah manis bagi kesejahteraan masyarakat.

**Mari Bersama PKS, kita wujudkan politik yang bersih, beretika, dan melayani.**

**H. MUHAMMAD  
KHOLID, S.E., M.SI**

Sekjen Partai Keadilan  
Sejahtera

# PKS PELAYAN MASYARAKAT



Update Berita Fraksi PKS melalui <https://fraksi.pks.id>

 Scan Me



 **PKS TV DPR RI**

 **FPKS DPR RI**

 **fraksipksdprri**

 **@fraksipksdprri**

 **@fpksdprri**

